

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT LOKAL PADA
DESA RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN
LUWU UTARA (TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

Oleh,

YOGA ARDIANSYAH

NIM 15.0301.0007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT LOKAL PADA
DESA RAMPOANG KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN
LUWU UTARA (TINJAUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Study
Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

Oleh,

**YOGA ARDIANSYAH
NIM. 15 0301 0007**

Dibawa Bimbingan :

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.A.g., M.Pd**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoga Ardiansyah

Nim : 15 0301 0007

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Judul : Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 14 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

Yoga Ardiansyah
NIM. 15 0301 0007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)”* ditulis Oleh **Yoga Ardiansyah**, NIM **15 0301 0007**, Prodi **Hukum Keluarga**, Fakultas Syariah Institut Agama Isla Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari **Kamis, 31 Januari 2019**, yang bertepatan **25 Jumadil Awal 1440 H** telah direvisi sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum).

Palopo, 31 Januari 2019
25 Jumadil Awal 1440 H

Tim Penguji

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H (Sekretaris Sidang) (.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H (Penguji I) (.....)
4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI (Penguji II) (.....)
5. Dr.Hj.A. Sukmawati Assaad, M.Pd (Pembimbing I) (.....)
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI (Pembimbing II) (.....)

Mengetahui,

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol, M.Ag
NIP: 19691104 199403 1 004

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP: 19680507 199903 1 004

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “**Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Yoga Ardiansyah
Nim : 15 0301 0007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasah
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 14 Januari 2019

Penguji I

Penguji II

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

NIP. 19680507 199903 1 004

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

NIP. 19770201 201101 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 14 Januari 2019

Lamp :

Ha : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yoga Ardiansyah

NIM : 15 0301 0007

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : “Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

NIP. 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 14 Januari 2019

Lamp :

Ha : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yoga Ardiansyah

NIM : 15 0301 0007

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : “Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji II

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI.

NIP. 19770201 201101 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Yoga Ardiansyah
Nim : 15 0301 0007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasah
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 14 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.A.g., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 14 Januari 2019

Lamp :

Ha : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yoga Ardiansyah

NIM : 15 0301 0007

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : “Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.A.g., M.Pd

NIP. 19720502 200112 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 14 Januari 2019

Lamp :

Ha : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yoga Ardiansyah

NIM : 15 0301 0007

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : “Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP.19820124 200901 2 006

PRAKATA

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul ” **“Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal Pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)”**. Dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian serta tepat pada waktunya, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Sebagai *uswatun hasanah* bagi umat Islam.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis peruntukkan kepada orang tua penulis, Ayahanda Usman. D dan Ibunda Masria yang telah merawat, membesarkan, mencintai setulus hati dan selalu mendoakan penulis serta menjadi motivasi besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih banyak penulis ucapkan semoga kelak bisa kembali berkumpul di Surga-Nya. *Allahumma Aamiin*.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar Sarjana S1 (Sarjana 1) pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat

terwujud sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus–tulusnya, kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.
3. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Abdain, M.HI. Selaku Dekan II, dan Dr.Helmi Kamal, M.HI. selaku Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang senantiasa membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
4. Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang selama ini selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Pembimbing I dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dalam pemberian arahan dan bimbingan

penulisan ini yang tidak ada henti–henti memberikan semangat, motivasi, petunjuk dan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Penguji I dan Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Penguji II dalam penulisan skripsi ini selalu bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi yang dikembangkan oleh penulis.
7. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. penulis ucapkan banyak terima kasih, sekaligus sebagai ibu angkat kedua penulis berada di Kota Palopo ini untuk mencapai gelar sarjana, atas budi balasan yang selama ini diberikan baik secara materi maupun non materil, yang telah menempatkan dan memberikan kepercayaan terhadap penulis untuk tinggal dikediaman rumah yang telah diberikan \pm tiga tahun dan menghampiri empat tahun semoga Allah SWT akan selalu membalas budi pekerti yang di berikan kepada penulis.
8. Para Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya para dosen program studi Hukum Keluarga yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Selaku dosen dan sekaligus sosok seorang kakak buat penulis yang sangat banyak membantu dalam memberikan solusi, kontribusi di dalam dan di luar proses ini
10. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta stafnya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.

11. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Keluarga (HK) angkatan tahun 2015, dan mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN), maupun mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Mahasiswa Fakultas Syariah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. yang selama ini membantu dan senantiasa memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
12. Teman organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Earh Hour Kota Palopo. Trip Trooper Kota Palopo. Saudara PPL di Pengadilan Agama Makassar, serta teman-teman mahasiswa KKN Kecamatan Mapeddeceng angkatan 34 tahun 2018. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas ucapan selamat dan motivasinya dalam menyelesaikan strata satu ini dalam mencapai gelar sarjana ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas semuanya.

Akhirnya kepada Allah SWT. Penulis bermohon semoga bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Palopo, 14 Januari 2019

Penulis,

Yoga Ardiansyah

NIM. 15 0301 0007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	v
HALAMAN NOTA DINAS PENGUJI	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Pengertian Judul, dan Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
B. Kajian Teori	17
1. Pengertian Mawaris (<i>Faraidh</i>) atau ilmu Pembagian Warisan.....	17
2. Pengertian Rukun- Rukun Waris Mewarisi dalam Pembagian Warisan	19
3. Dasar-dasar Hukum Maris Mewarisi dalam Pembagian Warisan	22
4. Syarat-syarat Waris Mewarisi dalam Pembagian Warisan	26

5. Sebab-sebab waris mewarisi dalam Kewarisan Islam.	27
6. Peruntukkan Harta Peninggalan dan Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan Mayat	30
7. Kewarisan Hukum Adat.....	32
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
C. Informan Penelitian	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Praktik Pembagian Kewarisan Islam pada Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.....	54
C. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.....	70
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Susunan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa Rampoang Tahun 2018	48
Tabel 4.2	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Rampoang	56
Tabe 4.3	: Luas Wilayah Desa Rampoang Menurut Penggunaan Tanahnya.....	52
Tabel. 4.4	: Jumlah Pemeluk Agama Di Desa Rampoang	52
Table 4.5	: Jumlah Tingkat Pendidikan Terakhir Di Desa Rampoang.....	53
Tabel 4.6	: Berdasarkan Tingkat Jumlah Di Dusun Desa Rampoang	54

ABSTRAK

Nama : YOGA ARDIANSYAH
NIM : 15 0301 0007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal Pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam).

Kata Kunci : Praktik Pembagian Warisan, Tinjauan Hukum Kewarisan Islam

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pembagian kewarisan masyarakat pada lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap Praktik pembagian warisan di masyarakat lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian yuridis empiris menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Adapun subyek dalam penelitian adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Desa Rampoang. Objek penelitian ini praktik pembagian warisan masyarakat lokal Desa Rampoang. Pendekatan normatif yuridis, teologi, sosiologi. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, studi pustaka dan kajian dokumen, tehnik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil Penelitian menunjukan bahwa; Praktik pembagian kewarisan masyarakat lokal Desa Rampoang ternyata menggunakan pembagian warisan berdasarkan hukum adat cara pembagian warisannya bahwa anak perempuan terakhir yang berhak mendapatkan harta rumah walaupun telah diberikan sebidang tanah, hanya sebagian Informan menggunakan pembagian berdasarkan hukum Islam. Tinjauan hukum kewarisan dalam pembagian warisan hanya ada seorang yang membagi hartanya berdasarkan hukum kewarisan Islam tetapi tidak menggunakan asas kematian penyebabnya pewaris dalam keadaan masih hidup, pembagian warisan yang dilaksanakan masih belum sesuai dalam hukum Islam, penyebabnya bahwa harta rumah diberikan kembali kepada seorang laki-laki, sedangkan pembagian warisan dua banding satu berdasarkan tashaluh (ahli yang di setuju) ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, pembagian harta warisan ini lebih menekankan secara sistem kekeluargaan hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta bertujuan untuk tidak menimbulkan konflik persengketaan diantara para keluarga.

Implikasi penelitian ini diharapkan perlunya dibentuk tim dari tokoh agama, dan komponen lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait hukum kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi antara sistem dan praktik kewarisan dalam hukum Islam dan sistem kewarisan dalam hukum adat yang berada pada masyarakat lokal Desa Rampong

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Dalam era modern saat ini tentunya hal yang menjadi fundamental di masyarakat pada umumnya haruslah memahami dan mengerti sebuah aturan hukum kewarisan, karena dalam memahami ilmu kewarisan hal yang wajib, kewajiban memahami ilmu kewarisan adalah fardu kifayah

Bagi seorang muslim, tanpa tidak terkecuali baik laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum warisan Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa) karena merupakan fardu kifayah.¹

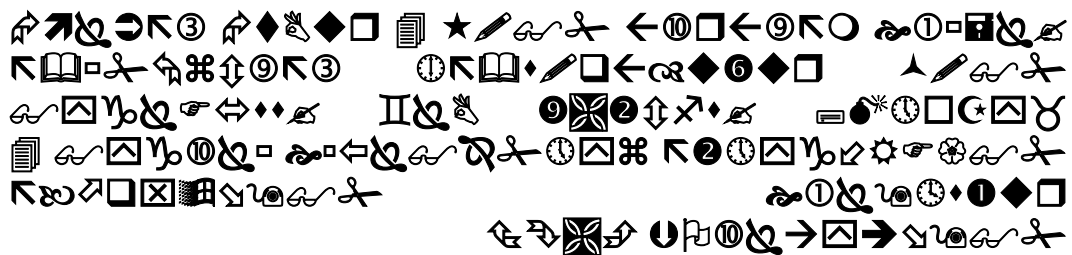
Namun dalam keluarga haruslah berperan aktif dalam mempelajari ilmu kewarisan dan sistem pembagiannya, karena kaidah atau peraturan hukum telah jelas (*nash-nash*). Ketetapan hukum dalam agama Islam wajib memberi pelaksanaan apabila dalam ketentuan lain tidak dibahas namun ketentuan dalam bertindak ketika mendasar wajib maka haruslah dilaksanakan *nash-nash* terdahulu.

Bagi setiap pribadi muslim merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*nash-nash yang sharih*). Setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan

¹Suhrawardi, K.Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, (Ed. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.²

Hukum *faraidh*, tidak ada satu ketentuanpun (*nash*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam QS. An-Nisa'(4) ayat 13 dan 14 Allah SWT menetapkan:



Terjemahnya:

“adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar).³

Makna ayat di atas adalah bahwa itu adalah batas-batas hukum Allah SWT. Karena merupakan kewajiban dari Allah SWT dalam menjalankan batas-batasan Allah yang harus dipenuhi.⁴

Ketentuan tentang praktik pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits adalah ketentuan hukum yang bersifat wajib, dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya. Kewajiban dalam memahami ilmu kewarisan Islam dalam mengamalkan sebuah ilmu kewarisan adalah hal yang harus dipenuhi, agar kalangan kaum muslim

²Suhrawardi . K.Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, (Ed. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

³Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*” (Cet.1; Solo: PT.ABYAN,2014), h. 79.

⁴Agus Hidayatullah. et.all. *Tafsir Alwasi*. (Cipta Bagus Segara. Kota Bekasi 21 Januari 2013), h.79.

(khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada akhirnya akan melahirkan perpecahan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslim.⁵ Adapun perintah belajar dan mengajarkan Hukum waris Islam ini banyak kita jumpai dalam teks Hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, Iman an-Nasa'i dan ad-Daruquthni maupun ad Darimi sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتُظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Utsman bin al Haitsam telah menceritakan kepada kami 'Auf dari seseorang -ia dikenal dengan sebutan Sulaiman bin Jabir dari penduduk Hajar-, ia berkata: " Ibnu Mas'ud pernah berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajirlah ilmu fara'idl dan ajarkanlah kepada manusia, pelajirlah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya".⁶

Dalam riwayat Hadits yang lain disebutkan bahwa hanya ada tiga bidang ilmu yang utama, yakni belalajar ilmu, ilmu Fara-idl, dan pelajirlah Al-Quran sedangkan ilmu-ilmu yang lainnya itu hanyalah sebagai tambahan, hal ini

⁵Suhrawardi . K.Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, (Ed. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

⁶Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram ad-darimi, *Sunan Ad Darimi* Jus 1. *Kitab Mukaddimah*. Darul Fikri Bairut-Libanon. 1996 M. h. 73.

tegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr.⁷ Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رَشِيدُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ
أَنَعَمْ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ
فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul 'Ala' Al Hamdani berkata; telah menceritakan kepadaku Risydin bin Sa'd dan Ja'far bin Aun dari Ibnu An'um -yaitu Al Afriqi- dari Abdurrahman bin Rafi' dari Abdullah bin 'Amru ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Ilmu itu ada tiga, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan; ayat muhkamat, sunnah yang tegak dan fara'idl yang adil." ⁸

Namun pada perkembangan hukum waris di Indonesia, selama ini diwarnai oleh tiga sistem hukum waris. Ketiga sistem hukum waris itu adalah, sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.⁹ Yang merupakan sistem hukum dari ketiga sistem tersebut yang sekarang tidak terlepas dari asas-asas yang menjadi pendukung. Sistem hukum meliputi susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Sehingga adanya sebuah sistem hukum tersebut untuk menemukan pola keberhasilan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum juga mempunyai beberapa pedoman dan pembentuknya. Maka demikian juga adanya sistem hukum kewarisan nasional, diharapkan asas-asasnya berasal dari sub sistem hukum

⁷Sayid Sabiq, *Al- Wajil fi Fiqh As-Sunnah* di Terjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki judul “*Fiqh Sunnah*” (Cet,I: Jilid,IV:1988),2006 h. 238.

⁸ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy A's Assubuhastaani. *Sunan Abu Daud* Juz 2. No. 2885. *Kitab Waris*. (Darul Kutub I'lmiah Bairut-Libanon), 1996 M, h. 328

⁹Wery Gusmansyah, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*. (Manhaj. Mei– Agustus, 2013). h. 153.

kewarisan yang turut andil di dalam proses pembentukannya dan praktiknya, dan tentunya adalah ketiga sistem hukum dimaksud di atas. Masyarakat Desa Rampoang Dengan jumlah penduduk yang tercatat secara administratif yaitu 2.060 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.008 jiwa, dan perempuan berjumlah 1.052 jiwa. Dari total jumlah penduduk Desa Rampoang tersebut, dengan pemeluk agama Islam pada masyarakat lokal Desa Rampoang adalah 2.060 jiwa sesuai dengan jumlah penduduk yang tercatat secara administratif dengan Jumlah kepala keluarga 525 KK.¹⁰

Terkait kurangnya pemahaman kapasisas keilmuan terkait dengan pembagian warisan melalui tinjauan hukum kewarisan Islam. Akibatnya masyarakat lokal Desa Rampoang dominan menggunakan hukum adat dan terkadang membagi hartanya secara *Hibah* (hadiah). Tentunya pada masyarakat lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum waris Islam sehingga sering salah persepsi. Akibatnya tidak sedikit pula terjadi konflik atau perselisihan antara sesama ahli waris tersebut karena merasa pembagian tidak merata dan tidak sesuai dengan kaidah dan peraturan dari syariat Islam.

Bahkan tidak jarang timbul perkelahian hingga saling berselisih karena merasa pembagian tidak merata. Hukum waris Islam membahas kedudukan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi ahli waris dan tata cara penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan sistem hukum Islam.

¹⁰ Sumber Data. Kantor Desa Rampoang tanggal 18 Desember tahun 2018

Terjadinya perselisihan dan perkelahian antar keluarga tentang harta warisan itu diakibatkan antara lain mekanisme pembagian warisan yang tergantung dari keadaan tertentu, dalam menyelesaikan kasus warisan tanpa didukung penguasaan konsep secara bertahap, hukum waris Islam dianggap sulit dan membosankan. Dan sering terjadi di masyarakat bahwa sebelum meninggal membagi-bagikan harta kepada anak-anaknya, padahal pembagian itu bukan sebagai harta warisan melainkan *Hibah* (hadiah). Sehingga persepsi masyarakat mengenai harta warisan tidak peduli untuk mengetahui sistem pembagian warisan dan untuk mengetahui ilmunya juga kadang merasa apatis terhadap sebuah ilmu.

Namun pada intinya hukum kewarisan wajib diketahui oleh setiap masyarakat. Sehingga orientasinya haruslah memberikan ilmu kewarisan dan pemahaman terhadap masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Isu-isu yang menghangat di masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Sekarang bahwasanya tidak sedikit para ahli waris yang menyelesaikan harta warisannya dengan cara hukum Islam maupun dengan hukum adat. Oleh karena itu dari kedua bentuk sistem hukum tersebut dipadukan, sehingga menjadi pedoman bagi para ahli waris dalam menyelesaikan harta warisan.

Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menafsirkan dan memahami norma hukum dan norma agama, terutama bagi para pelaksana dan aparat penegak hukum. Sehingga penulis melakukan penelitian di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menulis untuk memenuhi Praktik pembagian

warisan masyarakat lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembagian Kewarisan Masyarakat Lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?

C. *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan secara deskriptif tentang:

1. Praktik pembagian kewarisan masyarakat lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
2. Tinjauan hukum kewarisan Islam melalui praktik pembagian warisan di masyarakat lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

D. *Manfaat Penelitian*

Agar memberikan sebuah hasil penelitian yang berguna untuk masyarakat dan mahasiswa hukum keluarga maupun mahasiswa Fakultas Syariah, serta diharapkan mampu menjadi tolak ukur secara keseluruhan untuk dijadikan

pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum kewarisan Islam khususnya agar implementasi praktik tentang sistem pembagian kewarisan Islam masyarakat lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Dapat diterapkan sehingga tidak ada masalah yang timbul mengenai warisan dalam keluarga, ketika mengetahui cara mengimplementasi ilmu kewarisan Islam secara maksimal dalam Keluarga.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi penulis

Untuk menjadi bekal pengetahuan bagi seorang penulis. Dan membentuk pola pikir, kemudian dari sebuah penelitian yang akan dilakukan penulis mampu menganalisis akar masalah yang didapatkan di lapangan, sehingga ilmu pengetahuan yang didapat di perkuliahan dapat diaplikasikan dalam Tridarma Perguruan Tinggi yakni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi.

b. Bagi masyarakat

Agar ilmu hukum kewarisan Islam masyarakat lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Agar mampu dipahami seperti apa pembagian hukum kewarisan Islam dan mengetahui sistem implementasi dalam praktik pembagian kewarisan Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data kualitatif dan kuantitatif sebagai pelengkap bagi seseorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga dan memberikan sumbangan pemikiran dari penelitian agar tercipta kemajuan pengembangan tentang ilmu faraid ataupun ilmu kewarisan Islam, dan dapat menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah.

E. *Pengertian Judul, dan Ruang Lingkup Penelitian*

1. Pengertian judul

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini dan persepsi yang sama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitiannya diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata yang tercakup dalam judul tersebut. Yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu praktik pembagian warisan di masyarakat lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, dan tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap Praktik pembagian warisan di masyarakat Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Yang diangkat oleh penulis untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya maka disajikan pembahasan sebagai berikut:

a. Pengertian Kewarisan

Kewarisan merupakan kewarisan Islam terdiri dari dua suku kata yaitu “kewarisan” dan “Islam” dari segi pengertian, kewarisan berasal dari. Dalam bahasa Arab, kata *al-mirat* adalah bentuk masdar dari *waritsa* yaitu *irtsan* atau

miratsan berarti mewarisi. yang mempunyai arti berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris yang diberikan kepada ahli warisnya.

Dalam pasal 830 yang dikatakan pewaris hanya berlangsung karena kematian.¹¹ Dalam sistem praktik pembagian warisan tentunya kita harus memahami ilmunya bagaimana sistem pembagian, agar dapat mengetahui siapa saja yang mendapatkan dan berhak dalam praktik pembagian warisan.

Syariat Islam telah mengatur sistem pembagian kewarisan dengan cara yang terbaik, akurat, dan adil, Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapatkan dengan cara yang sah.¹²

Kewarisan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah kepemilikan harta, sedangkan harta merupakan salah satu cara terpenting dalam sendi kehidupan manusia baik secara individu maupun bermasyarakat, sehingga harta ini sangat urgen sehingga perlu pengetahuan terhadap ilmu kewarisan Islam.

b. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, yang umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu milateral, patrilinear dan atau parental.¹³

¹¹Effendi perangin, *Hukum Waris*, (Ed.I.Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2016), h. 3.

¹²Muhammad Ali al-Sabouni, *Al-Mirats Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah* Cet I: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah Penerjemah Hamdan Rasyid Judul *Hukum Kewarisan menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta:, Printer, Publisir & Distributors) 2005, h. 40.

¹³H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum kewarisan Islam dengan kewarisan kitab undang-undang hukuun perdata*, (Ed.Revisi.Cet.1:Jakarta:Sinar Grafika,2004), h. 3.

Hukum kewarisan Islam tentunya berlandaskan dasar hukum yang berasal dari Al-Quran dan Hadits dan Ijtihad para ulama terdahulu. Warisan dalam Islam pula disebut dengan ilmu *mawaris* atau ilmu *faraid*. Dalam bahasa Arab, kata *al-mirat* adalah bentuk masdar dari *waritsa* yaitu *irtsan* atau *miratsan* berarti mewarisi. Atau contoh lain dari makna lain adalah si Fulan telah mewarisi kerabatnya, atau ia telah mewarisi ayahnya. Dan juga dalam firman Allah SWT bersabda dalam QS. An-Naml (27) ayat 16;



Terjemahnya:

“dan Sulaiman telah mewarisi Daud”

Sedangkan ditinjau dari segi istilah Ilmu Faraidh, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah. Sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.¹⁴

Objek sebuah kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya telah disabdakan Rasulullah Saw dengan bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءٍ بْنِ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ

¹⁴Muhammad Ali al-Sabouni, *Al-Mirats Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah* Cet I : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah Penerjemah Hamdan Rasyid Judul *Hukum Kewarisan menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta:, Printer, Publisers & Distributors) 2005, h. 41.

لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتها رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَّاتُ فِي جُوفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ لَقِيتُ شَيْبَةَ بْنِ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوْدَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَغْنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud aku mendengar 'Ashim bin Raja bin Haiwah menceritakan dari Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abu Ad Darda di masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ad Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena sebuah hadits yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu." Abu Ad Darda lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Wazir Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Al Walid ia berkata; aku berjumpa dengan Syabib bin Syaibah lalu ia menceritakannya kepadaku dari Utsman bin Abu Saudah dari Abu Ad Darda dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan maknanya".¹⁵

¹⁵Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy A's Assubuhastaani. *Sunan Abu Daud* Juz.2 No. 3641 *Kitab Ilmu*. (Darul Kutub I'lmiyah Bairut-Libanon). 1996 M. h. 523.

Sementara harta peninggalan (*at-tirkah*) ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri. Maka segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sudah wafat, dalam istilah *jumhur* (mayoritas) *Fuqaha* disebut harta peninggalan, baik orang yang meninggal (mayit) tersebut menanggung hutang atau tidak, dan baik hutang tersebut berupa hutang '*aniyah*, maupun berupa hutang *syakhshiyah*.

Makna hutang '*aniyah*, adalah hutang yang berkaitan dengan materi seperti gadai yang terkait dengan barang yang digadaikan, sedangkan yang dimaksud hutang *syakhshiyah* adalah hutang yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada seseorang pinjaman uang, mahar dan lain-lainnya.¹⁶

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, agar tidak menyimpang dan menjadi lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada masalah-masalah yang dianggap relevan dan penting untuk menuntaskan masalah yang diajukan oleh peneliti yang meliputi sebagai berikut:

- a. Praktik pembagian hukum kewarisan Islam.
- b. Pandangan masyarakat terhadap tinjauan hukum kewarisan Islam.
- c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap praktik dan tinjauan hukum kewarisan Islam lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

¹⁶ Muhammad Ali al-Sabouni, *Al-Mirats Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah* Cet I: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah Penerjemah Hamdan Rasyid Judul *Hukum Kewarisan menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta:, Printer, Publisir & Distributors) 2005, h. 42-43.

F. *Sistematika Pembahasan.*

Untuk mempermudah penyajian dalam pembahasan skripsi ini dan memberikan gambaran yang jelas serta mudah dipahami, maka secara garis besar sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I yang membahas masalah pendahuluan yang berisikan beberapa sub bab diantaranya yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian pengertian judul dan ruang lingkup penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II yang membahas masalah tinjauan pustaka yang berisikan beberapa sub bab diantaranya yaitu: penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka (landasan teori), dan kerangka Pikir.

BAB III yang membahas masalah metode penelitian yang berisikan beberapah sub bab diantaranya yaitu: lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. Dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV yang membahas masalah hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya terdapat beberapa pokok kajian atau pokok pembahasan yaitu: lokasi penelitian, latar belakang praktik pembagian ilmu kewarisan Islam pada masyarakat lokal pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Dan tinjauan hukum kewarisan Islam melalui praktik pembagian warisan di masyarakat lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

BAB V Penutup. Bab ini menjadi bab terakhir yang berisikan dua sub bab yaitu: kesimpulan dan implikasi atau saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Sepanjang penelusuran peneliti belum ada literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian di antaranya ada yang hampir sama apa yang dibahas oleh peneliti, tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Megawati, sistem pelaksanaan pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe Kecamatan Campalagian. Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Dikalangan masyarakat Desa parappe yang memberikan hartanya kepada anaknya yang telah menikah dahulu, hal tersebut masuk ke dalam kategori hibah namun masyarakat setempat tetap memahami hal tersebut sebagian pembagian harta warisan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan orang tua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.¹
2. Ervianti. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Kewarisan Di Desa Jaya Bhakti. Kecamatan Mesuji. Kabupaten Ogan Komering Ilir. Provinsi. Sumatera Selatan. Dalam perspektif hukum Islam ialah mengenai terbukanya pembagian warisan tidak sesuai dengan hukum Islam, yakni pada saat pewaris dalam keadaan masih hidup dan pewaris dalam sudah meninggal semua, ahli waris

¹ Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,) 2016.

adalah anak keturunan pewaris dan bagian-bagian yang didapat ialah sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan.²

3. Resky Anugrah, cara pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat ada lokal Desa Tellupanua Kabupaten Barru. (1) Cara pembagian warisan pada masyarakat Desa Tellupanua yaitu pertama, dengan cara memisahkan rumah pewaris terlebih dahulu dengan harta lainnya kemudian rumah tersebut terkhusus milik dari pihak perempuan. (2) Pembagian dengan cara dua banding satu maksudnya setelah rumah dan harta lainnya sudah dipisah maka yang dipisahkan dari rumah tadi itu akan diberikan kepada pihak laki-laki dan perempuan dengan dua banding satu.³

Dari penelitian-penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang digunakan dari ketiga penulis tersebut pada penulis (1) pendekatan yang di gunakan normatif (syar'i, yuridis) dalam penelitian pemberian harta kepada anaknya yang terlebih dahulu menikah hal tersebut secara hibah dan masyarakat memahami hal tersebut bagian dari pemberian harta terdahulu. Penulis (2). Pendekatan yang digunakan normatif bahwa penelitian terbukanya pembagian warisan tidak sesuai dengan hukum Islam, dan dibagi sama rata baik perempuan maupun laki-laki, dan Penulis (3) menggunakan pendekatan teologi, sosiologi dan normatif dengan penelitian membagi harta warisan dengan memisahkan harta waris rumahnya untuk diberikan kepada laki-

²Ervianti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Kewarisan Di Desa Jaya Bhakti. Kecamatan Mesuji. Kabupaten Ogan Komering Ilir. Provinsi. Sumatera Selatan*. Skripsi, (Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). 2016.

³Resky Anugrah, cara pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat ada lokal Desa Tellupanua Kabupaten Barru. Skripsi,(Palopo. Institut Agama Islam Negeri). 2018.

laki dan perempuan dengan dua cara pembagian harta. Adapun persamaannya adalah dengan pengambilan data atau analisis datanya, wawancara, analisis dengan menggunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian-penelitian di atas, jelas berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Dapat dilihat bahwa penulis membahas tentang pada Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Lokal Pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam). Dengan Pendekatan Normatif Yuridis, Teologi, sosiologis dan analisis data dan pengumpulan data dan penarikan kesimpulan.

B. *Kajian Teori*

1. *Pengertian Mawaris (Faraidh) atau ilmu Pembagian Warisan*

Ilmu *mawaris* adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu fiqih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari *tirkah* mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.⁴

Bila ditinjau dari segi pengertian, dalam kamus hukum dijelaskan bahwa pengertian dari hukum ialah segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat.⁵

Dengan perkataan lain, fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan

⁴Abu malik kamal bin as-sayyid salim, *tuntunan praktis Hukum waris(lengkap dan padat menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih* (Cet.I; Januari 2010,Kairo-Mesir: Penerbit I maktabah at-Taufiiqiyyah dan Penerbit II Pustaka Ibnu ‘Umar .2010), h.3.

⁵Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Skripsi h. 12.

masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia.⁶

Nabi Muhammad Saw Menamai ilmu *mawaris* ini dengan *fara'idh* beliau bersabda:

دَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian *fara'idh* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)".⁷

Sedangkan pengertian dari kewarisan Islam terdiri dari dua suku kata yaitu “kewarisan” dan “Islam” dari segi pengertian, kewarisan berasal dari kata “waris” yang mempunyai arti berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris mempunyai makna orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia (wafat) dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarisan ialah suatu keadaan yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang atau hak

⁶Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Skripsi. h. 12.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi. *Shahih Bukhari Juz 8 Kitab: Fara'idh*. Darul Fikri Bairut-Libanon 1981 M. h. 5.

milik seseorang kepada orang lain sebab pertalian nasab diantara kedua belah pihak.⁸

Sedangkan Islam dalam arti secara maknawi merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an yang di turunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewarisan Islam ialah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak dan memiliki pertalian nasab, seperti keluarga atau masyarakat umumnya dan bagian yang telah ditentukan bagi tiap-tiap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut.

2. *Rukun- Rukun Waris Mewarisi Dalam Pembagian Warisan.*

Pusaka mempustaka mempunyai 3 (tiga) rukun, yaitu : *Mauruts (Tirkah)*, yaitu harta peninggalan si mati, *Muwaris* yaitu orang yang meninggal, dan *Waris* yaitu orang yang mewarisi atau ahli waris.

a. *Mauruts (Tirkah* atau harta peninggalan)

Mauruts adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.⁹

⁸Tim Penyusun. Dadang Sunendar, et.all. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

⁹Ashary Abta dan Djunaidi Abd.Syukur, *ilmu waris Al FaraidL*, (Cet I: Surabaya, JL. Batara jaya.2005). h. 18.

Istilah *mauruts* dikalangan ahli *faraidh* tidak sepopuler dengan istilah *tirkah* atau *tarikah*. Dalam pembahasan selanjutnya akan menggunakan istilah “*Tirkah*” (harta peninggalan).

Untuk menentukan *tirkah* jenis apa termasuk harta peninggalan si mati, maka ada beberapa macam *tirkah*, yaitu:

- 1) *Tirkah* yang berupa nilai kebendaan, baik berupa benda maupun sifat. Seperti benda tetap, benda bergerak, piutang, denda wajib (*diyat wajibah*), pengganti *qisas*.
- 2) *Tirkah* yang berupa hak-hak kebendaan. Seperti hak monopoli untuk menarik hasil jalan tol, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, hak cipta, pensiunan dan lain-lain.
- 3) *Tirkah* yang berupa hak yang bukan kebendaan. Seperti hak *khiyar*, hak *suf'ah* (hak utama dalam menentukan beli tanah dalam berserikat). Hak memanfaatkan yang diwasiatkan.
- 4) *Tirkah* yang berupa benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang digadaikan si mati, pembelian yang barangnya belum diterima, mas kawin yang belum diserahkan.

Dalam hal ini (jenis *tirkah*), para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- 1) Fuqaha' Hanafiyah yang sebagian besar mengartika bahwa “*Tirkah*”, adalah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazim, yang mengatakan bahwa harta benda peninggalan yang harus dipusakakan adalah

harta bendanya seperti hak mendirikan bangunan atau hak menanam tumbuhan diatas tanah.

- 2) Ulama Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanbaliyyah. Berpendapat bahwa “*Tirkah*”, adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak. Baik hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya saja Iman Malik yang tidak memasukkan hak menjadi wali nikah menjadi hak-haknya.

Hukum adat menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, bahwa harta benda yang ditinggalkan si mati tidak semuanya dapat diwarisi, dalam artian dapat diwarisi kepada ahli warisnya, tapi kadang-kadang harta benda peninggalan tersebut menjadi milik bersama.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Secara umum ketentuan hukum waris yang diatur dalam kompilasi hukum Islam(KHI) secara garis besar, tetap berpedoman pada garis-garis hukum *faraidh*, dan masih sangat dominan dalam perumusannya dibandingkan hukum adat.

Perumusannya masih memasukkan sistem kekeluargaan “Parental” atau “Bilateral”, namun itu semua lebih mengarah kepada sikap modifikasi secara terbatas yang dilakukan dengan hati dan benar selektif. KHI telah mengakui dalam berpandangan terhadap “*Tirkah*” mengatur adanya harta bersama/hasil serikat yang akan dibagi rata sebelum dipusakai oleh ahli waris. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 pada Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam BAB XIII pasal 85,87,88,97.

¹⁰Ashary Abta dan Djunaidi Abd.Syukur,*ilmu waris Al FaraidL*, (Cet I: Surabaya, JL. Batara jaya.2005). h. 22-24.

Berdasarkan dengan hak-hak yang bersangkutan dengan harta benda peninggalan si mati, Jumhurul fuqaha membagi harta ini menjadi 5 (Lima).

Dengan ketentuan yaitu:

- 1) Hak yang berhubungan dengan harta benda yang ditinggalkan.
- 2) Hak yang berhubungan dengan pengurusan perawatan Mayit (Tahfiz).
- 3) Hak yang berhubungan dengan hutang-hutang si mati.
- 4) Hak-hak yang berhubungan dengan wasiat.
- 5) Hak-hak yang berhubungan dengan Keluarga yang ditinggalkan yang semestinya mendapat harta warisan.

b. Muwarrits.

Muwarris yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmi (mati hukmi adalah kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim).

c. Warits.

Warits yaitu orang yang akan mewarisi harta benda si mati, karena mempunyai sebab-sebab untuk mempunyai seperti adanya ikatan kekeluargaan, perkawinan dan perwalian dengan si mati.¹¹

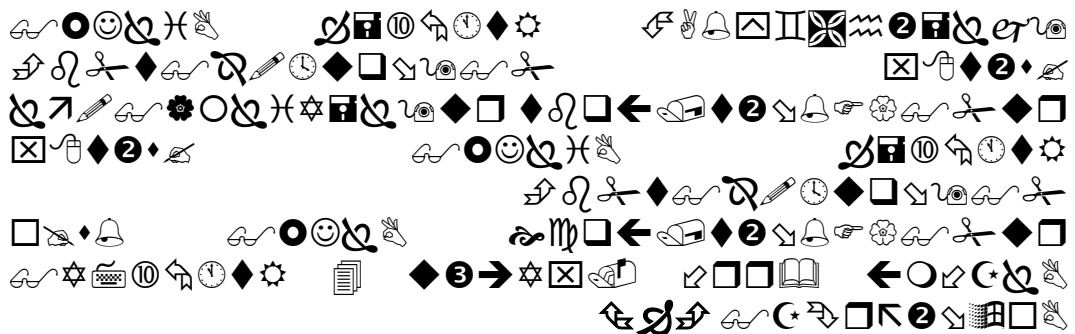
3. *Dasar-Dasar Hukum Maris Mewarisi Dalam Pembagian Warisan.*

Beberapa dasar-dasar hukum yang mengatur masalah waris mewarisi terdapat didalam:

- 1) Al-Quran yang terdiri dari Qs. An-Nisa Ayat.7, 11, 12, dan 176.

¹¹Ashary Abta dan Djunaidi Abd.Syukur,*ilmu waris Al Faraidl*,(Cet I: Surabaya. 2005). h. 27-28.

a) QS.An-Nisa (4) ayat 7.



Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.¹²

b) QS.An-Nisa ayat 11.



Terjemahnya:

¹²Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan” (Cet.1; Solo:PT.ABYAN,2014), h. 78.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seseorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seseorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹³

Ketentuan ayat mengenai warisan puluh dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 12 dengan makna tentang pembagian harta oleh suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Mengenai penjelasan hak bagi seorang istri dan suami.

Ketentuan lain juga dijelaskan dalam QS. An- Nisa ayat 176 tentang hak jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, tentang pembagian hak yang didapatkan oleh saudara apabila salah satu dari saudara meninggal dalam ayat ini menjelaskan mengenai bagian harta yang didapatkan oleh saudara perempuan, saudara laki-laki, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), Allah menerangkan (Hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segalanya”.

¹³Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”. h. 78.

2) Al-Hadits.

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ فَزَلَّتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ { قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Al Munkadir dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku ketika aku sakit tak sadarkan diri, lalu beliau berwudlu dan memercikkan air wudlunya kepadaku, sehingga aku pun sadar. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku mewariskan harta peninggalan? Maka turunlah ayat tentang warisan." Aku (Syu'bah) bertanya kepada Muhammad bin Munkadir, "Apakah (yang turun) Yastaftuunaka Qulillah Yuftiikum Fil Kalaalah (Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah). (Qs. An Nisaa: 176). Dia menjawab, "Seperti inilah ayat ini diturunkan”.¹⁴

3) Al-Ijma' dan Ijtihad

Sejumlah ketentuan faraidh telah diatur secara jelas di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Surat An-nisa ayat 7,11,12,176, dan surat-surat lainnya: sejumlah ketentuan lainnya di atur di dalam Al-Hadits: dan sejumlah ketentuan lainnya di atur di dalam Ijma' dan Ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab, dan para mujtahid lainnya.

Sumber-sumber hukum waris dalam konteks hukum positif di Indonesia. Itu termuat di dalam INPRES No 1. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang hukum kewarisan.¹⁵

¹⁴Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi. Shahih Muslim. Juz.2. No.1616 *Kitab: Waris*. Darul Fikri Bairut-Libanon. 1993 M. h. 57.

¹⁵H.R. Otje salman dan Mustofa haffas, *Hukum waris Islam* (Cet.III; PT Refika Aditama , 2010), h. 3.

Bagi ummat Islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh *nash-nash* yang sirih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dapat pula dari sabda Rasulullah S.A.W. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَأَلِيَ الْعَصْبَةُ مَنْ كَانَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Syababah dia berkata, telah menceritakan kepadaku Warqa' dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Demi dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidak ada seorang mukmin di muka bumi ini, kecuali akulah orang yang berhak atas diri mereka dari diri mereka sendiri, maka siapa saja yang mati meninggalkan hutang atau anak yang butuh santunan maka akulah walinya. Dan siapa saja dari kalian yang meninggalkan harta, maka (harta tersebut) untuk ahli waris yang tersisa”.¹⁶

4. *Syarat-Syarat Waris Mewarisi Dalam Pembagian Warisan.*

Pada dasarnya pusaka mempusakai berfungsi untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Mengingat bahwa hal ini menyangkut hak orang banyak, maka perlu ada syarat-syarat yang mengatur, agar tidak terjadi pelanggaran dalam memiliki harta benda tersebut. Adapun syarat-syarat pusaka mempusakai tersebut adalah:

- a. Matinya *Muwarris* (orang yang mempusakakan)

¹⁶Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi. *Shahih Muslim*. Juz.2. No. 1619 *Kitab: Waris*. Darul Fikri/ Bairut-Libanon. 1993 M. h. 58.

Sebagai akibat kematian muwarris adalah bahwa harta warisannya akan beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya. Untuk menentukan kematian yang dimaksud di sini, maka para ulama membaginya menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Mati hakiki (sejati).
- 2) Mati hukmi (menurut putusan hakim).
- 3) Mati *Taqdiri* (menurut dugaan).

b. Hidupnya *warist* disaat kematian *Muwarris*.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia benar-benar hidup pada saat muwarriskannya meninggal dunia, baik mati hakiki, hukmi maupun *tadri*.

Kepastian hidupnya si ahli waris ini sangat penting artinya, sebab masih ada ahli waris yang masih diragukan hidupnya, seperti orang hilang, anak masih dalam kandungan dan orang (ahli waris) yang mati bersamaan waktunya dengan si mati.

c. Diketahui pertalian antara pewaris dengan *muwarris*.

Diketahunya hubungan antara pewaris dengan *muwarris*, akan memudahkan dalam memberi (menentukan) hak kepada pewaris untuk menerima harta benda dari muwarris, seperti tidak terhalang oleh pewaris lainnya atau oleh sebab-sebab lainnya.¹⁷

5. ***Sebab-Sebab waris mewarisi dalam Kewarisan Islam.***

¹⁷Ashary Abta dan Djunaidi Abd.Syukur, *ilmu waris Al Faraidl*, (Cet I: Surabaya. 2005) h. 28-31.

Menurut Jumhurul ulama bahwa sebab-sebab seseorang mewarisi harta seseorang yang meninggal dunia ada 3 macam yaitu: kekerabatan, perkawinan dan *wala'* (memerdekakan budak).¹⁸

1. Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewarisi satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki atau ayah maupun dari garis ketetapan perempuan atau ibu.¹⁹

2. Hubungan Perkawinan.

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan Hukum yaitu berlakunya hubungan perkawinan:

- a) Adanya akad nikah yang sah
- b) Keduanya masih terkait perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga istri yang dalam masa *iddah* setelah di talak *raji'i* baik perempuan atau ibu.

¹⁸H.R.Otje salman dan Mustofa haffas, *Hukum waris Islam* (Cet.III; PT Refika Aditama , 2010), h. 31-33.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008). h. 175.

3. Hubungan Wala

Adanya hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya.²⁰ Dan dalam hadits juga diperkuat mengenai hubungan wala hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَصَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْنَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

Artinya :

telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwa Aisyah radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya, bahwa Barirah telah datang kepada Aisyah meminta bantuan kepadanya dalam hal perjanjian pembebasan dirinya, sementara ia tidak mampu melunasi sedikitpun dari perjanjin pembebasannya. Kemudian Aisyah berkata kepadanya, "Kembalilah kepada tuanmu, jika mereka mau aku melunasi pembayaranmu dan perwaliannya untukku, maka aku akan melakukannya." Kemudian Barirah menyebutkan hal tersebut kepada tuannya. Namun mereka menolak dan berkata, "Apabila Aisyah berkehendak untuk mendapatkan pahala dengan membebaskanmu maka silahkan ia melakukan, dan perwalianmu untuk kami." Aisyah kemudian menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berkata kepadanya: "Beli dan bebaskanlah dia, sesungguhnya perwalian adalah untuk orang yang telah membebaskan." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan bersabda: "Mengapa orang-orang membuat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah!

²⁰Qadi Abu Al Wahid bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al- Hafit. *Bidayatul Muhtahid* diterjemahkan oleh Abu Al-Majdi dengan Judul "*hukum Waris*"(Jil:5. Terjemahan. Jakarta : Pustaka Amani, 1995). h. 55.

Barangsiapa memberikan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka tidak ada hak baginya walaupun ia memberikan syarat sebanyak seratus kali. Syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat".²¹

4) Hubungan Seagama

Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui Baitulmaal. Hubungan ini terjadi apabila seseorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke Baitulmaal untuk digunakan oleh umat Islam.

6. *Peruntukkan Harta Peninggalan Dan Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan Mayat.*

1. Harta peninggalan secara berturut-turut, diperuntukkan bagi:
 - a. Biaya perawatan
 - b. Hutang-hutang
 - c. *Wasiat*
 - d. *Waris*.

Yang di maksud dengan perawatan adalah biaya-biaya yang perlukan dari saat meninggalnya si mati sampai dengan penguburannya itu merupakan biaya untuk memandikan, mengkafani, mengusung, dan menguburkan si mati. Biaya harus wajar, tidak berlebih-lebihan dan tidak sangat kurang. Yang dimaksud dengan utang mencukupi kewajiban–kewajiban terhadap Allah seperti zakat, pergi haji, pembayaran *kafarah*, dan lain-lainnya serta kewajiban terhadap sesama manusia.²²

2. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan *mayit*.

²¹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy A's Assubuhastaani. *Sunan Abu Daud*. Juz. 3. No.3929. *Kitab: Pembebasan Budak*. Darul Kutub I'lmiah Bairut-Libanon. 1996 M. h. 21.

²² Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid* Jilid 5. (jilid,5; Jakarta : Pustaka Amani, 1995) h. 6.

Jika seseorang meninggal, maka harta peninggalannya memiliki 5 (lima) hak yang harus ditunaikan dari harta tersebut. Jika harta tersebut terbatas, maka sebagian hak harus didahulukan dari hak-hak yang lainnya, berdasarkan urutan sebagai berikut:

- a. Biaya pengurusan *mayit*, yakni memandikan, mengkafani, menguburkan dan lain-lain secukupnya, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu irit. Hanya saja biaya ini didahulukan dari pembayaran utang. Karena diserupakan dengan pakaian (untuk menutup aurat) bagi seseorang yang masih hidup, maka pakaian ini tidak boleh dilepaskan untuk membayar utang.
- b. Pembayaran hutang-hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan si *mayit*. Misalnya utang dengan jumlah harta tersebut dan seumpunya.
- c. Pembayarn hutang-hutang yang tidak berkaitan dengan peninggalan *mayit*, baik itu berkaitan dengan hak-hak Allah seperti zakat, *kaffarat*, atau puasa yang harus di bayar. Bisa juga hak-hak yang berhubungan dengan manusia, seperti pinjaman upah dan selainnya.
- d. Pelaksanaan wasiat, maksimal sepertiga dari usia harta peninggalan setelah dikurangi hasil pengurusan mayit dan hutang-hutangnya. Hal ini karena pengurusan mayit dan perlunasan hutang adalah termaksud sesuatu yang darurat. Tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Maka sisanyalah yang menjadi miliknya untuk digunakan wasiat. Itupun tidak lebih dari sepertiganya.

Para ulama sepakat bahwa hutang harus lebih dulu dibayarkan daripada pelaksanaan wasiat. Hal ini berdasarkan Hadits Ali Bin Abi Thalib, ia berkata

Nabi Muhammad Saw menentukan Bahwa hutang haruslah lebih dahulu dibayarkan, sebelum pelaksanaan wasiat.²³

Pembagian harta peninggalannya mayit kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Pembagian ini berdasarkan ketentuan dalam kitabullah dan inilah yang menjadi tema pembahasan. Mengingat masalah-masalah warisan itu bercabang-cabang, saling berkaitan, dan termasuk sulit untuk mengambil keputusan hukum bagi selain orang yang dalam ilmunya, disamping memerlukan sedikit pemahaman dalam ilmu hitung.

7. *Kewarisan Hukum Adat.*

1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi maupun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi.²⁴

Jadi, harta warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.

Adat (Istilah Fiqih) adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara" (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh

²³Dihaskan oleh Al-Albani ra: dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (No 2091), Ibnu Majah (no.2715). Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *tuntunan praktis Hukum waris(lengkap dan padat menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*(Cet.I; Januari 2010,Kairo-Mesir: Penerbit I maktabah at-Taufiiqiyyah dan Penerbit II Pustaka Ibnu 'Umar .2010). h. 7-9.

²⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h.42

lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan.²⁵ Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia.

Macam-macam harta warisan dalam Adat yaitu sebagai berikut

1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya.²⁶ Harta asal itu terdiri dari:

a. Harta Peninggalan

Harta peninggalan dikelompokkan menjadi dua yaitu harta peninggalan yang tidak dapat dibagi dan harta peninggalan yang dapat terbagi:

1) Peninggalan yang tidak dapat dibagi. Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.²⁷

2) Peninggalan yang dapat terbagi

²⁵Abdul Mujieb, et. all. *Kamus Istilah Fikih*. h.3

²⁶Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h.42.

²⁷Eman Suparman. *Hukum Warisa Indonesia*. h. 42.

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan. Terbaginya harta peninggalan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah wafat, ketika pewaris masih hidup terdapat. Pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada ahli waris untuk menjadi bekal kehidupan para ahli waris selanjutnya.²⁸

b. Harta Bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, karena masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal dapat dilihat sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi

2. Harta warisan.

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak

²⁸Eman Suparman. *Hukum Warisa Indonesia(Dalam Perspektif Islam, Adat, Bw)*. h. 43.

maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.²⁹

3. Harta Pencarian

Harta Pencarian adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri.

4. Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula hutang tidak terbagi.

Harta yang dapat diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi seperti sepeda, gerobak, atau sepeda motor, mobil, kemudian alat-alat pertanian, senjata (termasuk yang berasal dari harta pusaka), harta bersama (pencarian bersama) orang tua, istri, atau suami, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud adalah seperti berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat atau perjanjian dan sebagainya.

2. Sistem Keturunan.

²⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 44.

Istilah sistem keturunan sangat erat hubungannya dengan sistem kewarisan. Sistem keturunan pada garis besarnya mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat sistem keturunan.³⁰

Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan bentuk perkawinan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota masyarakat adatnya. Demikian pula dalam hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut. Kita dapat membagi jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya yakni:

Garis keturunan lurus keatas dan kebawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus kebawah.

Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.³¹

Penentuan garis keturunan ini adalah bagian dari sistem kekerabatan yang menunjukkan apakah seseorang tersebut masuk kedalam keluarga yang sama dengan ibu dan bapaknya atau hanya dengan salah satu pihak, ibu atau bapak saja.

Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut, dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari

³⁰ Eman Suparman. *Hukum Warisa Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, Bw)*. (Cet; Ke Empat: Pt Refika Aditama, Bandung. Oktober 2014), h. 43.

³¹ Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 4

salah satu pihak saja (unilateral), dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (Bilateral). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yakni yang menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (Patrilineal) saja, dan yang menarik garis keturunan hanya dari pihak perempuan (Matrilineal) saja.³² Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda.

Dari ketiga sistem yang telah disebutkan sebelumnya, mungkin masi ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya “Sistem Patrilineal beralih-alih (*alternerend*) dan sistem unilateral berganda (*dubbel unilateral*)”.³³

Sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris juga mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

1) Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.

2) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.

³²Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*. h. 4.

³³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 284.

3) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada 2 macam, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak tertua laki-laki/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.³⁴

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya. karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.³⁵

1. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Batak.

2. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis keturunan ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan

³⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h.43

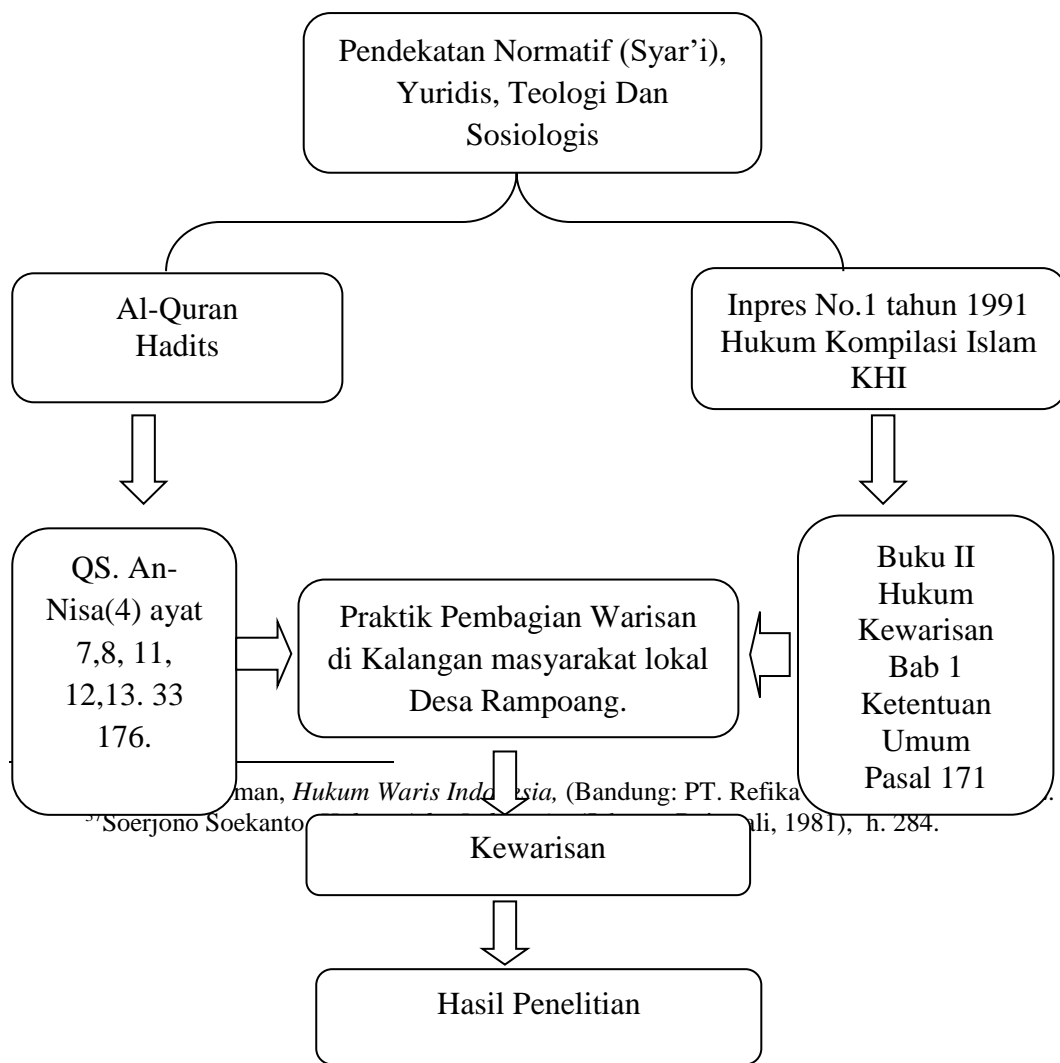
³⁵Elly Dwi Poespasari. *Pemahaman seputar Hukum waris Adat di Indonesia*.(Cet: 1 Penerbit Kencana. 2018.) h.42.

anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.³⁶

3. Sistem *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.³⁷

C. Kerangka Pikir

Berikut ini penulis akan memberikan gambaran dalam bentuk skema kerangka pikir mengenai Praktik Pembagian Warisan pada masyarakat lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam).



Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada Al-Quran dan Hadits yang merupakan sebuah dasar hukum Islam dalam menentukan *nash-nash* yang membahas tentang kehidupan manusia di muka bumi. Yang dimana didalamnya membahas tentang ilmu kewarisan yang landasan Hukumnya di QS.An-Nisa ayat 7, 11, 12, 13, 33, dan ayat 176 hukum kewarisan Islam tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan ayat-ayat yang sempurna. Jelas dan akurat, setelah merujuk pada dasar hukum tentunya kita akan melihat keputusan presiden, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang membahas aspek pembagian warisan secara spesifik dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Penulis dalam hal ini mengambil data dengan wawancara dengan masyarakat setempat dengan aspek judul pembagian Praktik Warisan Pada Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam). Untuk mengetahui penerapan pembagian praktik warisan masyarakat lokal Desa Rampoang. Dengan merujuk atas pembagian warisan Islam atau dengan aspek hukum pembagian warisan dengan hukum adat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulis skripsi ini, maka di lakukan penelitian di Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian yang akan di teliti.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Field research*). Suatu pendekatan yang menurut Denzin dan Lincoln dianggap sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹ Hal yang kurang lebih sama diajukan oleh Koentjoro bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang multi-metodologi atau dengan kata lain, penelitian kualitatif bukanlah penelitian tunggal namun di dalamnya terdapat banyak cara atau *inquiries*.²

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.5.

²Koentjoro, *Berbagai jenis inquiry dalam penelitian kualitatif Unpublished manuscript*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007), h. 11.

Selain itu, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui dan dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.³ Inilah yang menurut peneliti tidak dapat dilakukan oleh penelitian yang bersifat kuantitatif positivistik.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian Hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan Hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa Hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Pendekatan yang di maksud adalah:

1) pendekatan Normatif (Syar'i) dan Yuridis, yaitu peneliti berusaha menelaah dan menganalisa teori-teori atau konsep-konsep yang ada dalam berbagai sumber hukum islam dan menurut para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian tentang praktik pembagian warisan masyarakat pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

³Anselm., Strauss & Juliet, Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*. (M. Shodiq & Muttaqien, Terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 4.

⁴E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan kualitatif dalam penelitian Psikologi* (Jakarta: LPSP3, 1998), h.17.

2) Pendekatan teologi, yaitu peneliti mendeskripsikan objek penelitian dan menggunakan berbagai macam pandangan/pendapat berdasarkan nilai-nilai agama (Islam).

3) Pendekatan Sosiologis, yaitu penelitian berusaha untuk mendeskripsikan objek peneliti dengan memperhatikan persoalan perilaku yang tumbuh dan berkembang disosial kemasyarakatan umat Islam tentang pembagian warisan Islam.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek Hukum dan realita yang terjadi Pada Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam).

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Penggunaan teknik *purposive sampling* berarti peneliti memilih informan berdasarkan kepercayaan bahwa informan tersebut dipercaya dapat memberikan kontribusi terhadap topik yang diteliti. Informan penelitian akan ditentukan berdasarkan keunikan situasi yang terjadi. masyarakat lokal Pada Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam).

Kriteria-kriteria informan yang dipilih akan diperinci sebagai berikut:

- a. Mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pengambilan putusan.
- b. Bersedia menjadi informan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data, meliputi kegiatan: (a) Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen, (b) Melakukan *review* dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul dengan melaksanakan refleksinya, (c) Menentukan strategi pengumpulan data yang paling tepat dan menentukan fokus serta pendalaman dan pemantapan data pada proses pengumpulan data berikutnya, (d) Mengelompokkan data untuk kepentingan pembahasan atau analisis, dengan memperhatikan variabel yang terlibat pada kerangka pemikiran.

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang diperlukan, maka menurut Patton teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan teknik: (1) Observasi, (2) Wawancara mendalam (*indepth interviewing*), dan (3) Kajian dokumen (*Content Analysis*).⁵

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa Hukum di lokasi.⁶ Observasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.

⁵Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 64.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

b. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang sudah disiapkan terlebih dahulu, yang disesuaikan pembuatan alatnya berdasarkan proposal penelitian.

Pengumpulan data melalui observasi lapangan dilakukan di Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam).

2) Wawancara mendalam (*indepth interviewing*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan,⁷ yang akan memberikan peneliti informasi mengenai, antara lain, yaitu:⁸

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa Hukum yang terjadi;
- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa Hukum yang terjadi;
- c. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa Hukum;
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa Hukum yang terjadi.

Hingga kini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pribadi responden,

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004)., h. 86.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. h. 86-87.

pendapat atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.⁹

Adapun metode pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam merupakan metode utama di dalam penelitian ini. Wawancara jenis ini merupakan wawancara yang dipandu oleh sejumlah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun sendiri oleh peneliti. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara menurut panduan wawancara yang disusun berdasarkan kajian pustaka tentang Praktik pembagian warisan dalam tinjauan Hukum kewarisan Islam.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang telah mengalami aktivitas, interaksi, dan proses dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Kewarisan Islam)

3) Kajian dokumen (*Content Analysis*)

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari dalam Pengadilan Agama (*data internal*) dan luar Pengadilan Agama (*eksternal*). Sumber data sekunder internal diperoleh dari wawancara dan Adapun sumber data eksternal diperoleh dari literatur, materi perkuliahan, buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang didapatkan melalui penelitian kualitatif juga harus dianalisis, namun metode analisisnya berbeda dengan metode analisis pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis induktif, data di

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004),. h. 88.

lapangan merupakan sumber utama bagi penyusunan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Teknik analisis dilakukan melalui proses analisis di lapangan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data.

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, yang membagi proses tahap ini dalam tiga komponen pokok, yaitu:¹⁰

a. Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan data dari catatan lapangan (*fieldnotes*), membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

b. Sajian data (*data display*) adalah data yang telah terkumpul disusun dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), dengan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui, pola-pola, pernyataan-pernyataan, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan-kesimpulan sementara, yang diverifikasi.

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 91-99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Profil Lokasi Penelitian*

Tabel 4.1
Susunan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Rampoang
Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim Pokja
1	Ardaus	Kepala Desa	Pembina
2	Rusdiawal	Sekretaris Desa	Ketua
3	Akbar	Bendahara Desa	Sekretaris
4	Silviana	Kaur Umum	Anggota
5	Suaib Alwi	Kaur Pembangunan	Anggota
6	Hasna	Kaur Pemerintahan	Anggota
7	Vetti Vetriani	Kaur Keuangan	Anggota
8	Lukman	Kepala Dusun Benteng	Anggota
9	Haeruddin P	Kepala Dusun Rampoang	Anggota
10	Supardin	Kepala Dusun Londoinga	Anggota

Sumber Data: Kantor Desa Rampoang tahun 2018

1. **Visi dan Misi Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.**

Visi

Membangun kampung dalam kebersamaan, dengan ber peradaban Islam.

Misi

- 1) Mengedepankan pelayanan di berbagai bidang.
- 2) Pembinaan generasi muda.
- 3) Menata sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan demi terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengaktifkan kegiatan majelis Ta'lim
- 5) Menghadirkan pemerintahan yang terbuka.

Secara spesifikasi Visi dan Misi Desa Rampoang terurai dalam rincian
Sebagai berikut:

Visi :

- 1) Membangun kampung dalam kebersamaan, dengan berperadaban Islam.
 - a) Kebersamaan hanya akan tercipta mana kala seorang pemimpin tahu dan paham bahwa hakekat kehadirannya hanyalah sebagai pelayan bukan penguasa.
 - b) Kebersamaan hanya akan terwujud mana kala seorang pemimpin di dalam setiap kebijakan-kebijakannya tidak selalu pandang bulu, tidak tebang pilih dan tidak dendam.
 - c) Kebersamaan hanya akan diwujudkan oleh seorang pemimpin yang tahu dan paham bahwa keberadaannya bukan mili orang perorang, bukan milik satu golongan atau satu kelompok tetapi dia adalah milik semua orang.

Misi:

- 1) Mengedepankan pelayanan diberbagai bidang Pelayanan yang maksimal hanya akan dapat terwujud mana kala pemerintahan yang kita hadirkan adalah pemerintahan yang berintegritas, yakni punya kemauan, punya kemampuan, serta disiplin yang tinggi.
- 2) Pembinaan generasi muda. Yang insya allah akan kita mulai dari pembinaan anak usia dini dimana program-program yang telah kita persiapkan adalah program-program dengan budaya Islam, misalnya pembinaan lewat TPA dan Program-program yang lainnya.

- 3) Menata sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan demi Lahan persawahan kita ada, tambak luar biasa, tinggal mengupayakan untuk menambah sarana dan prasarana seperti jalan tani dan teknis pengairan yang baik, serta pembinaan kelompok tani yang cukup.
- 4) Mengaktifkan kegiatan majelis Ta'lim.
- 5) Menghadirkan pemerintahan yang terbuka salah satu bentuk keberhasilan seorang pemerintah Desa yakni, mana kala dia telah mampu membangun paradigm atau pola berpikir masyarakatnya menjadi lebih kritis, kritis yang positif atau kritis yang membangun bukan kritis yang negatif untuk mencederai. Pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang senantiasa mengutamakan musyawarah didalam setiap mengambil keputusan.

Tabel 4.2
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Rampoang.

No	Nama	Jumlah
1	Perangkat Desa	10 orang
2	BPD	9 orang
3	RT	7 orang
4	RW	- Orang
5	LPMD	- Orang
6	KPMD	2 orang

Sumber Data : Kantor Desa Rampoang tahun 2018

2. Letak dan Geografis daerah Penelitian

Desa Rampoang adalah Desa yang berada di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Desa Rampoang terdiri dari penduduk asli dan suku pendatang lainnya, diantaranya suku luwu, dan suku bugis adapun suku jawa tidak begitu banyak. Yang perlu mendapat

penjelasan dalam bidang sosial budaya ini menurut penulis adalah agama, pendidikan

Jarak tempuh ke ibukota kecamatan sejauh ± 5.2 Km dengan waktu tempuh sekitar 5 menit. Jalan raya menuju ibukota kecamatan cukup bagus sedangkan jalan lingkungan desa merupakan jalan penghubung dari beberapa desa dengan lokasi aspal yang telah rusak sekitar 80 %. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten luwu utara sejauh ± 30 km dengan lama tempuh sekitar ± 45 menit. Desa Rampoang timur berbatasan dengan beberapa Desa diantaranya;

- 1) Sebelah utara berbatas dengan : Desa Patila dan Desa Sidobinangun
- 2) Sebelah timur berbatas dengan : Desa Karondang dan Desa Sumberdadi
- 3) Sebelah selatan berbatas dengan: Desa Munte dan teluk Bone
- 4) Sebelah barat berbatas dengan : Desa sidobinangun, desa Sidomakmur dan Desa Tamuku.

Desa Rampoang terdiri dari tiga dusun diantaranya Dusun Benteng, Dusun Rampoang, Dusun Londoinga. Setiap dusun dikepalai oleh Kepala Dusun, sedangkan keadaan penduduknya di Dusun Tersebut mayoritas Penduduk asli. Hanya sebagian kecil saja merupakan penduduk pendatang dari daerah lain. Jarak antar rumah sangat berdekatan antar rumah kerumah dan antar dusun ke dusun.

a. Luas Daerah

Desa Rampoang terdiri 3 Dusun dengan Luas Wilayah 17.048 Km². Kemudian keseluruhan luas ini terbagi dalam area-area perkebunan, tambak, sawah masyarakat, dan perkarangan penduduk dan lain-lainnya, untu lebih

jelasan dapat dilihat tabel dibawah ini mengenai luas wilayah Desa Rampoang menurut Penggunaan tanahnya.

Tabel 4.3
Luas Wilayah Desa Rampoang Menurut Penggunaan Tanahnya.

No	Jenis Penggunaannya	Jumlah Hektar
1	Tanah Desa	-
2	Kompleks Balai Desa	0,25 M ²
3	Tanah Kuburan	17.000 M ²
4	Sawah Masyarakat	125 Hektar
5	Perkebunan	1.112 Hektar.
6	Perkarangan penduduk	80 Hektar.
7	Tanah wakap	2 hektar.
8	Tambak	300 Hektar.
Total Luas wilayah		17.048 Km ² .

Sumber data : Kantor Desa Rampoang tahun 2018

b. Agama

Masyarakat penduduk asli di Desa Rampoang menganut agama Islam, jadi dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk masyarakat Desa Rampoang adalah merupakan Penganut Agama Islam. Jumlah mesjid di Desa Rampoang yaitu ada 3 di setiap dusun Terdapat bangunan Mesjid.

Tabel. 4.4
Jumlah Pemeluk Agama di Desa Rampoang.

No	Agama	Pemeluk
1	Islam	2.060 jiwa
2	Kristen	- Jiwa
3	Katolik	- Jiwa
4	Hindu	- Jiwa
5	Budha	- Jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Rampoang tahun 2018

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi dengan hasil capaian yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut:

Table 4.5
Jumlah tingkat pendidikan terakhir di Desa Rampoang.

No	Tingkatan Terakhir Sekolah	Jumlah orang
1	Jumlah Buta Huruf	- Unit
2	Tidak tamat SD	321 orang
3	Tamat SD/ sederajat	547 orang
4	Tamat SMP/ sederajat	672 orang
5	Tamat SMA	461 orang
6	D-1	8 orang
7	D-2	5 orang
8	D-3	9 orang
9	S-1	37 orang

Sumber Data : Kantor Desa Rampoang tahun 2018

d. Adat istiadat

Masyarakat Lokal Desa Rampoang dengan adat istiadatnya yakni Mapacci, balasuji, tolak balah yang merupakan bagian dari kegiatan masyarakat lokal Desa Rampoang, adapun dengan acara Mapacci yakni di sebut dengan pada saat rangkaian kegiatan pernikahan masyarakat Lokal Desa Rampoang dalam Kegiatan tersebut.

3. Penduduk

Dengan jumlah penduduk yang tercatat secara administratif yaitu 2.060 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.008 jiwa, dan perempuan berjumlah 1.052 jiwa. Kepadatan penduduk sudah mencapai 2.060 jiwa penduduk tetap, jiwa dengan jumlah kepala Keluarga, 525 KK. Dari total jumlah penduduk Desa Rampoang tersebut, Desa Rampoang masuk dalam wilayah Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah Desa Rampoang 17.048 Km².

Penyebaran penduduk desa rampoang tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel:

Tabel 5.5
Berdasarkan tingkat jumlah di dusun Desa Rampoang

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Benteng	419	440	859	209
Rampoang	243	288	531	146
Londoinga	346	324	670	170
Jumlah	1.008	1.052	2.060	525

Sumber Data : Kantor Desa Rampoang tahun 2018

4. Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Rampoang

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Rampoang terlihat dari mata pencaharian mayoritas adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Desa Rampoang untuk tahun 2018 ini tidak mengalami peningkatan yang besar hal ini dapat dipahami dengan berbagai macam masalah yang mereka hadapi yang hingga saat ini cukup sulit untuk menemukan solusinya. Indikasi terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa rampoang salah satunya adalah ketersediaan pabrik kelapa sawit.

B. *Praktik Pembagian Kewarisan Islam Pada Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.*

1. Pemahaman masyarakat Lokal Desa Rampoang terkait tentang kewarisan Islam.

Pemahaman masyarakat tentang kewarisan Islam, bahwa kurangnya pemahaman mengenai praktik kewarisan Islam hal ini disampaikan dari duabelas Informan, masyarakat lokal pada Desa Rampoang hanya mengetahui ilmu kewarisan Islam tapi hanya dasar-dasarnya, masalah warisan menurutnya adalah pembagian harta yang diberikan oleh orang tuanya berapa yang didapatkan anak-

anak laki-laki dan perempuan namun masyarakat tersebut hanya memahami pada hal tertentu tidak secara menyeluruh. Ada pula yang memahami tentang pembagian warisan Islam namun tidak diaplikasikan dan diterapkan dalam keluarganya karena bahwa praktik pembagian warisan Islam sangatlah sulit. Dan hampir seluruhnya informan tidak paham dengan praktik pembagian warisan tersebut.

Terkait hal tersebut maka ditarik benang merah mengenai pemahaman masyarakat terhadap ilmu kewarisan dari duabelas Informan masyarakat hanya ada beberapa yang mengetahui ilmu kewarisan Islam dan paham selebihnya kurang tahu dan tidak begitu paham.

2. Praktik Pembagian kewarisan masyarakat Lokal Pada Desa Rampoang.

Praktik Pembagian kewarisan di Desa Rampoang dilakukan secara hukum adat yang bersifat kekeluargaan yang menjadi objek penelitian penulis. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Oleh Roswita sebagai berikut:

“saya mendapatkan harta warisan dengan menggunakan hukum adat secara kekeluargaan dibagi rata dan dikumpulnya keluarga, pembagian harta dengan cara harta dijumlahkan terlebih dahulu, barulah dibagi rata”¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam pembagian harta warisan oleh keluarganya menggunakan hukum adat secara kekeluargaan dengan membagi harta secara adil dalam perspektif hukum adat, dimana Roswita memiliki 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Cara pembagian hartanya dengan cara menunjukkan harta yang akan diberikan, yakni ketiga anak

¹Roswita. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 03 Januari 2019

laki-laki masing-masing mendapatkan harta yang berupa tanah perkebunan dengan luas yang berbeda, dan dua orang perempuan mendapatkan tanah persawahan yang dibagi rata oleh kedua anak perempuan tersebut, dalam proses pembagiannya mendatangi para tokoh adat dan tokoh pemerintahan agar tidak terjadinya perselisihan antara sesama orang yang mendapatkan ahli waris. Sebagian harta belum dibagi habis termasuk rumah karena pewaris masih dalam keadaan hidup.

Warisan adalah semua harta benda ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi maupun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi. Namun ternyata ibu tersebut hanya memahami dasar-dasar hukum kewarisan Islam, sehingga dalam penyelesaian pembagian harta warisannya lebih kepada hukum adat yang bersifat kekeluargaan. Lebih lanjut, dijelaskan Roswita bahwa masalah yang pernah ia temukan di masyarakat.

“ada masalah yang saya temukan dulunya di Desa Rampoang tentang tanah adat atau pusaka yang menjadi bahan sengketa oleh anak cucu yang ingin mendapatkannya. Dan saya kurang setuju apabila pembagian harta warisan secara Islam diterapkan di keluarga saya”.²

Pembagian harta warisan dalam keluarga bapak Nasbar, dalam membagi hartanya, dikatakan sebagai;

“praktik pembagian warisan di keluarga saya menggunakan hukum adat dengan cara lisan dan tertulis dan menunjukkan harta yang dibagi. Secara kekeluargaan dari kesepakatan bersama keluarga, apabila terdapat masalah membagi hartanya maka yang harus di panggil olehnya adalah keluarga yang lebih dituakan atau saudara tertua yang mengetahui seluk beluk harta tersebut.” Saya tidak setuju kalau saya gunakan hukum kewarisan islam, karna kebanyakan dari masyarakat lokal desa rampoang menggunakan hukum adat.³

²Roswita. Wawancara. Tanggal 03 Januari 2019

³Nasbar. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 03 Januari 2019.

dipahami bahwa pembagian harta beliau lebih kepada hukum adat dengan tidak melihat banyak sedikitnya harta yang di bagi karena merupakan bagian dari kesepakatan bersama keluarga dan mendatangkan para saksi dalam proses pembagiannya apabila mendapatkan masalah dalam membagi hartanya. anak perempuan terakhir mendapatkan rumah yang ditempati oleh pewaris, sedangkan ketiga anak laki-laki mendapatkan tanah perkebunan masing-masing dari anak ini mendapatkan sebidang tanah dengan cara penunjukkan oleh pewaris kepada ahli waris. Dan meminta tanggapan beliau dalam penerapan apabila pembagian warisan secara Islam diterapkan dikeluarganya itu sangatlah susah menurutnya karena masyarakat Desa Rampoang kurang paham akan pengetahuan tentang pembagian hukum kewarisan Islam dan lebih kepada hukum adat.

Hal yang berbeda sebagaimana dalam pembagian harta dalam keluarganya yang dikatakan Umarsidi mengenai praktik pembagian warisan, bapak Umarsidi sebagai ahli waris yang diberikan harta warisan dari pewaris atau orang yang meninggalkan waris, mengatakan sebagai berikut:

“bahwa dalam lingkungan keluarganya tentunya saya belum membagi harta saya kepada anak-anak, tetapi saya akan menerangkan pembagian harta yang saya dapatkan dari orang tua saya, bahwa orang tua saya membagi hartanya secara kekeluargaan dalam sistem pembagiannya tidak membedakan perempuan dan laki-laki menggunakan musyawarah dalam kesepakatan bersama untuk menentukan suatu keadilan dalam pembagian hartanya”⁴

Dipahami bahwa Umarsidi belum membagi hartanya kepada anak-anaknya tetapi ia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, menggunakan hukum adat dibagi secara adil Secara umum pembagian harta diselesaikan dalam bentuk

⁴Umarsidi. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 03 Januari 2019.

kekeluargaan dan pemerintahan dan belum pernah di selesaikan dalam agama atau dalam sistem pembagian hukum kewarisan Islam,

Harta yang didapatkan dalam dari orangtuanya bahwa 4 saudara perempuannya mendapatkan tanah kosong namun dibagi rata atau dalam hitungan Islam sepertiga dari harta yang diberikan, sedangkan empat saudara laki-lakinya termasuk bapak Umarsidi mendapatkan tanah perkebunan kelapa sawit, mengapa yang berhak mendapatkan perkebunan kelapa sawit adalah saudara laki-laki karena pewaris sudah memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa anak-anak laki-lakilah yang berhak, karena dulunya yang menanam kelapa sawit tersebut adalah anak laki-lakinya dan adil menurut orang tua ahli waris. Dan sedangkan rumah didapatkan oleh anak perempuan terakhir walaupun sudah diberikannya setengah harta tanah kosong.

Secara umum apabila ada sengketa warisan harus diselesaikan secara pemerintahan dan kekeluargaan terlebih dahulu, dan belum pernah di selesaikan dalam bentuk hukum islam, dan biasanya melalui tokoh masyarakat. Dalam wawancara saya dengan bapak umarsidi ia mengetahui ilmu kewarisan Islam.

“saya mengetahui pembagian warisan secara Islam karena pemabagian kewarisan secara islam merupakan syariat Islam,saya akan menerapkannya dikeluarga saya ketika saya sudah ingin membagi harta saya nantinya kepada anak-anaknya”. Dan saya sangat setuju apabila hukum kewarisan Islam diterapkan didalam keluarganya. Tetapi masyarakat Desa Rampoang kurang paham dengan hukum kewarisan Islam. Sehingga masyarakat lebih menggunakan hukum adat.⁵

Tentunya beliau mengetahui hukum kewarisan Islam pendapat beliau sangat setuju apabila hukum kewarisan Islam ini diberikan pemahaman kepada masyarakat karena kurangnya rasa ingin tahu dan awan akan tentang praktik

⁵ Umarsidi. Wawancara, pada Tanggal 03 Januari 2019.

pembagian warisan menggunakan hukum Islam sehingga dipahami secara menyeluruh dimasyarakat Rampoang. Dan bapak Umarsidi sangat setuju apabila pembagian harta warisan diterapkan didalam keluarga, karena ini merupakan syariat Islam.

Hal lain juga disampaikan oleh Tokoh Agama oleh Akbar sebagai Iman Desa Rampoang dikatakannya bahwa:

“menurutnya bahwa praktik pembagian warisan dalam islam haruslah menggunakan hukum kewarisan islam, namun masyarakat lokal desa Rampoang lebih Dikenal dengan menggunakan Hukum Adat kekeluargaan, contohnya saja sebelum orang tua saya meninggal, orangtua membagi harta menggunakan hukum adat dan membagi harta secara habisa dan sama rata kepada keluarganya dan mendatangkan para tokoh masyarakat pada saat itu”.⁶

Dari hasil Pemaparan beliau Mengetahui ilmu kewarisan Islam, namun dalam pembagian harta yang didapatkan dari orang tuanya membagi harta dengan musyawarah dan di sepakati oleh keluarga, dan mendatangkan para pemuka agama dan tokoh adat masyarakat lokal desa Rampoang, dan para saksi sehingga tidak menimbulkan sengketa warisan karena adanya suatu kesepakatan bersama walaupun ada yang mendapatkan banyak ataupun sedikit. Karena menurutnya pembagian yang diterapkan dalam keluarganya adil.

Penyampaian yang lain disampaikan oleh Mujenni mengatakan bahwa:

“saya mengetahui ilmu praktik pembagian warisan secara Islam berapah yang didapatkan oleh seorang anak perempuan dan anak laki-laki, tapi dalam keluarga saya dan harta yang saya dapatkan dari keluarga itu tanah dan pembagian harta tersebut menggunakan hukum adat secara kekeluargaan dan membagi harta secara habisa. warisan menurutnya pembagian harta yang diberikan oleh ahli waris terhadap pewaris. Saya melihat pembagian harta didesa rampoang terkadang yang mendapatkan harta warisan banyak ialah seorang anak perempuan, karena saya

⁶Akbar. Iman Desa Rampoang, wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 04 Januari 2019.

beranggapan bahwa kebanyakan dari mereka yang diikuti oleh suaminya tergantung dengan kondisi lagi disetiap lingkungan keluarganya menurut saya”.⁷

Hasil wawancara diatas mengenai praktik pembagian warisan dilingkungan keluarga ibu Mujenni maupun dalam lingkungan masyarakat lokal desa Rampoang, dalam penerapannya pembagian hartanya menggunakan hukum adat, harta yang diberikan oleh pewaris adalah dengan cara penunjukkan harta warisan dalam hal ini sangatlah berbeda ternyata dalam keluarga Mujenni yang sebagai ahli waris, rumah yang berhak mendapatkannya adalah saudara laki-lakinya hal ini telah disampaikan pewaris jauh sebelum meninggal.

Kedua saudara perempuan mendapat Tanah dengan cara ditunjukkan walaupun tanah tersebut ada yang luas dan kecil dan itu merupakan pembagian secara adil menurut pewaris. Namun saudara keduanya lebih banyak harta warisan yang diberikan oleh pewaris mulai dari disekolahnya hingga sekolahkannya hingga mendapatkan beberapa tanah. Tetapi ahli waris tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ini sudah pembagian harta warisan oleh pewaris sebelum meninggal dunia.

Apabila dalam pembagian harta menggunakan hukum kewarisan Islam yang seharusnya menerima banyak adalah laki-laki seharusnya, tapi kenyataan pola pemikiran dimasyarakat lokal desa rampoang bahwa dalam membagi harta harus dengan rasa keadilan dalam membagi harta habis di bagi rata itu perspektif pembagian melalui hukum adat, bahwa menurutnya kenapa laki-laki mendapatkan banyak hartanya karena ia yang menafkahi keluarga dan anaknya tetapi kondisi yang terjadi tidak seperti itu karena seorang suami juga terkadang tidak diberikan

⁷Mujenni. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 04 Januari 2019.

harta warisan dari keluarganya karena tidak mempunyai harta warisan. apabila harta dibagi secara hukum kewarisan maka ia menurutnya ada terjadi perselisihan karena seorang anak perempuan beranggapan bahwa pembagian harta secara hukum Islam itu tidak merata bagi anak perempuan. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara ibu mujenni adalah membagi hartanya dengan hukum adat. Dan tidak setuju apabila ia menerapkan pembagian warisan menggunakan hukum kewarisan Islam.

Hal yang serupa disampaikan oleh Sumardin Dg. Mattiro mengenai praktik pembagian kewarisan, menyampaikan bahwa:

“saya tidak mengetahui praktik pembagian warisan secara islam, namun dasar-dasar pembagian warisan berapa yang didapatkan laki-laki di bandingkan perempuan saya tahu. saya tidak terlalu mendalam memahami praktik pembagian warisan secara Islam. Menurut beliau pembagian harta yang diterapkan dalam keluarga adalah dengan cara penunjukkan harta warisan”.⁸

Tidak mengetahui secara menyeluruh praktik pembagian warisan secara Islam namun dasar-dasar kewarisan ia tahu tanggapan bapak tersebut, apabila mengetahui pembagian warisan dalam islam maka akan menerapkan pembagian warisan didalam lingkup keluarganya, dan sangat setuju apabila praktik pembagian kewarisan Islam diterapkan dan diperkenalkan oleh masyarakat karena merupakan bagian dari syariat Islam. Dan masyarakat lokal Desa rampoang menurutnya kurang memahami ilmu kewarisan Islam.

Pembagian harta dalam keluarga bapak Sumardin, terlebih dahulu menghitung hartanya yakni dalam hal ini tanah ada berapah bidang tanah setelah itu mendatangkan para tokoh adat dan saksi yang dekat dengan pewaris, setelah

⁸Sumardin Dg. Mattiro. Tokoh Masyarakat. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 05 Januari 2019.

hal tersebut dijalankan maka barulah anak-anak yang akan mendapatkan ahli waris barulah dikumpulkan dan meminta kesepakatan dari anak-anaknya, setelah kata kesepakatan muncul barulah harta warisan ditunjukkan kepada ahli waris dari pewaris.

Pewaris memiliki beberapa orang anak diantaranya tiga orang anak perempuan dan tiga orang anak laki dalam pembagian harta warisan secara adat harta yang diberikan hanya tanah perkebunan hal itu dibagi rata sesuai dengan taksiran barang yang akan dibagi baik anak laki-laki maupun anak perempuannya, dan untuk rumah yang tempat tinggal pewaris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak perempuan terakhir, karena pewaris merasa bahwa dialah yang berhak mendapatkannya karena menemani pewaris sampai tua.

Hal ini pula dikatakan oleh Jasmil, dalam penyampaian mengenai praktik pembagian kewarisan bahwa:

“Saya kurang paham tentang Praktik pembagian warisan Islam dan tidak mengetahui sama sekali tetapi praktik pembagian warisan yang saya terapkan di keluarga saya adalah praktik pembagian warisan dengan hukum adat secara kekeluargaan dan mendatangkan para saksi yang terdekat dengan saya, pembagian tersebut harus adil dan dibagi rata”.⁹

Hasil pemaparan diatas praktik pembagian kewarisan oleh jasmil menggunakan hukum adat, cara pembagian hartanya dengan musyawarah, bapak Jasmil yang mempunyai anak yang terdiri dari satu orang anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan, harta yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris seorang anak laki-laki mendapatkan tanah perkebunan, sedangkan dua anak perempuan juga mendapatkan tanah masing-masing sebidang tanah perkebunan,

⁹Jasmil. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 06 Januari 2019.

namun anak perempuan yang terakhir mendapatkan hak rumah menurut pewaris. Dan sebagian harta pewaris belum dibagi habis karena pewaris masih dalam keadaan hidup, dan sebagian harta pewaris dibagikan oleh keponankan dengan mmberikan sebidang tanah dengan membagi rata tersebut.

Tidak mengetahui sama sekali perihal praktik pembagian warisan dengan hukum kewarisan secara Islam. Namun beliau ketika saya mintaki sebuah tanggapan argumentasi yang membangun tentang persoalan praktik pembagian warisan apabila ia mengetahui ilmu kewarisan islam dan menerapkannya di keluarganya pendapat beliau setuju, dan beliau berkata pulah Bahwa dalam praktik hukum kewarisan Islam sejatinya di perkenalkan oleh masyarakat lokal Desa Rampoang.

Kepala Dusun Londoinga selaku aparat pemerintah Desa Rampoang oleh Supardin mengatakan bahwa:

“Sedikit tahu tentang ilmu kewarisan, menurut sayaa warisan adalah praktik pembagian harta warisan oleh ahli waris terhadap orang yang warisi. Dan warisan itu terbagi dua menurut saya warisan harta dan warisan ilmu, Namun dalam penerapan pembagian warisan yang saya terapkan menggunakan hukum adat. membagi harta secara adil dan bersifat musyawarah tertutup oleh keluarganya saja untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam mendapatkan harta warisan”.¹⁰

Pembagian harta yang didapatkan oleh pewaris dan merupakan orang yang akan diwariskan harta, dalam proses pembagian harta warisan pewaris menggunakan hukum adat, yang terdiri empat saudara laki dan empat anak perempuan, saudara laki-laki pertamanya mendapatkan dua sebidang tanah karena mneurut pewaris merupakan anak pertama yang banyak membantunya. Lalu tiga saudara laki-laki masing-masing mendaptkan sebidang tanah

¹⁰Supardin. Kepala Dusun Londoinga, wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 06 Januari 2019.

perkebunan yang kosong, sedangkan harta warisan yang didapatkan oleh empat saudara perempuan mendapatkan tanah masing-masing sebidang tanah tetapi saudara perempuan terakhir juga mendapatkan hak rumah.

tetapi tidak menyampingkan hukum Islam, apabila dalam hukum adat terdapat masalah maka hukum Islam akan berlaku dalam proses pembagian harta warisan untuk menemukan suatu kesepakatan bersama dan menunggu hasil keputusan sehingga para keluarga tidak merasa di kecilkan dan harta yang didapatkan adil. Ketika meminta pendapat bapak Supardin mengenai penerapan hukum kewarisan Islam, bahwa ia setuju apabila praktik pembagian kewarisan Islam diterapkan dikeluarganya.

Hal yang berbeda disampaikan tokoh masyarakat oleh Bahran dalam peretemuan peneliti dengan nara sumber mengatakan sebagai berikut;

“menurut saya mengetahui praktik pembagian warisan secara Islam tentunya dalam penerapan pembagian harta dikeluarganya menggunakan pembagian warisan secara Islam, namun tidak menyampingkan pembagian harta dengan menggunakan hukum adat, menurutnya apabila didalam pembagian harta warisan secara hukum adat, apabila terdapat masalah pembagiannya maka saya menggunakan pembagian warisan secara Islam”.¹¹

Pembagian harta warisan saya kepada ketiga anak-anaknya adalah dimana anggota keluarga terdiri satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan dua pertiga harta yang akan diberikan oleh pewaris dan dua anak perempuan mendapatkan setengah harta yang diberikan. Harta yang didapatkan anak laki-laki mendapatkan tanah dan rumah, sedangkan dua anak perempuan mendapatkan tanah namun dibagi habis oleh kedua saudara

¹¹Bahran. Ketua Bundes , wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 06 Januari 2019.

perempuannya, jadi dalam hal ini harta yang diberikan oleh pewaris sesuai dengan hukum kewarisan Islam yakni Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan adalah dua berbanding satu.

Dalam masyarakat lokal Desa Rampoang lebih kepada menggunakan hukum adat dan sampai sekarang masih menggunakan hukum adat, namun sebagian kecil menggunakan hukum Islam, menurut beliau bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa warisan yang pernah didapat oleh beliau menyelesaikan sengketa warisan menggunakan hukum adat, apabila hukum adat belum menemukan suatu kesepakatan dalam pembagian harta warisan, maka praktik hukum kewarisan Islam yang diterapkan.

“praktik pembagian harta warisan menggunakan hukum kewarisan Islam sangat setuju apabila diperkenalkan di masyarakat lokal Desa Rampoang karena merupakan suatu syariat Islam.”¹²

Karena menurutnya inilah yang sebenarnya dan tentunya sebagai umat yang beragama tentunya kita mempelajari hukum kewarisan Islam karena merupakan pulah Fardhu Kifayah. Sangat Setuju apabila pembagian kewarisan diterapkan dikeluarganya dan lingkungan masyarakat Lokal Desa Rampoang dan memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat awan.

¹²Bahrn. Ketua Bundes. Wawancara. Tanggal 06 Januari 2019.

Sejauh dari hasil pemaparan diatas maka peneliti tentunya perlu penjelasan dari Tokoh Adat mengenai praktik pembagian warisan di Desa Rampoang hal ini disampaikan Oleh Yusri P. Dg.Malinring sebagai berikut:

“ saya didesa Rampoang sebagai kepala tokoh adat masyarakat Lokal desa Rampoang, disini desa lebih kental hukum adatnya karena dari nenek moyang dahulu,warisan bersifat kekeluargaan karna saya pernah mendapatkan masalah warisan dan diselesaikan secara kekeluargaan menggunakan hukum adat, namun dunia saat ini sudah lebih berkembang, tentunya saya akan berusaha menggabungkan dua hukum yakni dengan adat dan hukum Islam, karna nah, desa Rampoang ini 100 % masyarakat Islam, sehingga kita perluh adanya juga penerapan hukum Islam”.¹³

Hasil wawancara diatas ternyata masyarakat Lokal Desa Rampoang lebih mengenal pembagian Hukum adat dan hanya sebagian kecil mengetahui Hukum Islam saja, namun seiring perkembangan modern saat ini tentunya masyarakat Desa Rampoang haruslah pondasi pahamana tentang syariat Islam tinggi puluh Karena merupakan masyarakat Islam yang hampir seluruhnya merupakan Penduduk Islam di desa Rampoang. Menurut tokoh adat bahwa dalam penyelesaian kasus sengketa warisan yang pernah didapatkan menurutnya walaupun hukum adat masih dikenal oleh msyarakat lokal Desa Rampoang, hukum Islam disering sekali dikombinasikan dalam penyelesaian sengketa warisan apabila hukum adat tidak menemukan kesepakatan dari para pihak maka yang digunakan hukum Islam. Untuk menemukan ketetapan hukum tentunya menggunakan tiga hukum menurutnya yakni hukum adat, pemerintahan, dan hukum Islam. Dan sangatlah mengharapkan apabila sedikit demi sedikit kita memperkenalkan hukum kewarisan Islam di lingkungan masyarakat Rampoang,

¹³Baso Yusril P. Dg Malinring. Tokoh adat Desa Rampoang, wawancara, di Desa Rampoang, pada Tanggal 06 Januari 2019

tetapi tanpa tidak langsung menghilangkan Hukum adat yang berada paada wilayah ini.

H. Bahlis Dalam pandangannya mengenai praktik pembagian warisan yang diterapkan di keluarganya mengatakan sebagai berikut:

“Dalam pengetahuan ilmu kewarisan Islam saya tidak tahu seperti apa nah, tapi saya sudah membagi harta warisan saya kepada anak-anaknya secara adil dan membaginya secara rata tanpa tidak pengecualian oleh saya semuanya sama, saya membagi dengan hukum adat dan mendatangkan para saksi tokoh adat dan tokoh masyarakat dan saya buat surat kuasa kepemilikan harta warisan yang saya bagi, dan sebagian tanah warisan saya hibahkan”.¹⁴

Pemaparan dari hasil diatas bahwa pembagian harta telah di bagi dengan menggunakan hukum adat yang bersifat kekeluargaan dan berkekuatan hukum tetap yang bersifat autentik karena membuat surat warisan yang akan diberikan kepada anak-anaknya, dan membagi harta secara adil menurutnya, pembagian harta warisan yang diberikan oleh pewaris yang terdiri dari tiga orang anak laki. Dan enam orang anak perempuan, pembagian hartanya dengan mengumpulkan anak-anaknya dan mendatangkan para saksi dari keluarga yang terdekat, harta yang didapatkan oleh tiga anak laki mendapatkan masing-masing tanah dengan luas yang sama, namun anak laki-laki yang paling terakhirlah yang berhak mendapatkan rumah pewaris.

Untuk enam orang anak perempuan mendapatkan pula masing-masing tanah dan fasilitas lainnya yang luasnya pula sesuai juga pembagiannnya dengan anak laki-laki. Harta warisan pewaris sebagian harta dihibahkan yakni pembangunan mesjid didusun benteng, dan dusun tondok tangga, setelah harta warisan dibagi

¹⁴H. Bahlis. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 08 Januari 2019

maka pewaris membuatkan surat wasiat masing ahli waris mendapatkan akta warisan yang bersifat autentik.

sebagian dari harta H.Bahlis dihibahkan di Desa Rampoang yakni pembangunan mesjid yang terletak di Dusun Benteng dan Tondok Tangga dalam pemberian harta yang dihibahkan akan membuat surat wasiat dari ahli waris. Dan lanjut dalam wawancara ketika penulis meminta tanggapan atau pendapat beliau mengenai apabila hukum kewarisan Islam diterapkan dikalangan keluarganya apabila ia mengetahui. H. Bahlis sangat setuju;

“saya sangat setuju apabila saya mengetahui hukum kewarisan Islam, maka hal itulah yang saya gunakan, tapi saya telaah membagi harta saya dan tidak ada terjadi perselisihan diantara anak-anak saya Karen adanya surat warisan yang saya buat, tentunya kita bisa memberikan pengenalan mengenai praktik pembagian kewarisan Islam pada masyarakat Rampoang, karena masyarakat disini seluruh penduduknya beragama Islam”.¹⁵

Kepala Desa Rampoang oleh Ardaus selaku kepala pemerintahan Desa Rampoang yang mengetahui masyarakatnya dan keadaan lingkungan masyarakatnya, baik adat istiadatnya maupun adat kebiasaannya, dan kemauan dari masyarakatnya seperti apa pola pikir dari masyarakatnya. Mengenai pendapat Ardaus terhadap praktik pembagian warisan, dikatakan sebagai berikut:

“praktik pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat sini (Desa Rampoang) menggunakan hukum adat yang bersifat keluarga, sampai saat ini menurut pemahan saya dulunya saya lihat oleh orang tua dulu ia membagi hartanya secara adil, dan terkadang harta pusaka yang dibagi oleh orang dulunya dengan turun temurun, dan hukum Islam sepertinya susah diaplikasi oleh masyarakat sini, sebagian kecil paham tapi kurang melaksanakan ”.¹⁶

¹⁵H. Bahlis. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 08 Januari 2019.

¹⁶Ardaus. Kepala Desa Rampoang, wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 08 Januari 2019

Hasil Pemaparan diatas oleh Kepala Desa Rampoang, masyarakat Desa Rampoang dalam penyelesaian sengketa warisan menggunakan hukum adat yang bersifat keluarga, harta yang terkadang di bagi secara turun temurun adalah harta pusaka dan sebagian kecil dari sekian banyak masyarakat hanya beberapah orang yang menggunakan hukum kewarisan Islam dan hampir dari seluruhnya tidak melaksanakan hukum Islam karena masyarakat lokal Rampoang beranggapan bahwa membagi harta dalam Islam tidak adil, menurut beliau juga dalam mengenai pendapat apabila hukum kewarisan Islam dipekernalkan oleh masyarakat Desa Rampoang berpendapat bahwa;

“sangatlah sulit apabila hukum kewarisan ingin diterapkan di masyarakat Desa Rampoang karena yang dipahami oleh masyarakat disini hukum adat dari nenek moyang, namun sebagian kecil pasti ada yang melaksanakan hukum kewarisan Islam, tetapi sebagian besar tidak mampu mempratekkan hukum Islam karena berpacu pada hukum adat”.¹⁷

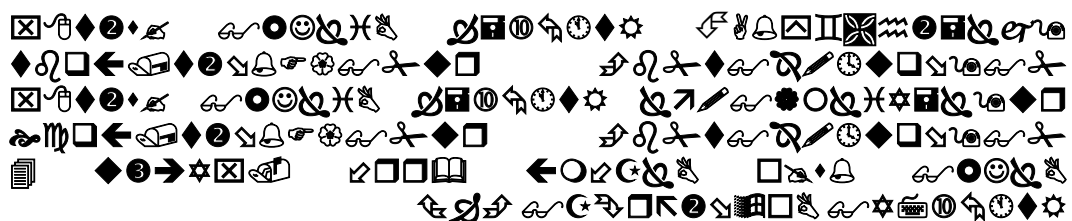
Dalam Visi Misi Desa Rampoang sangatlaah sulit di wujudkan “Membangun kampung dalam kebersamaan, dengan berperadaban Islam’ karena dalam praktik pembagian warisan masyarakat Rampoang sulit mengaplikasi praktik pembagian warisan Islam karena berpacu pada hukum adat namun pemberian ilmu tentang hukum kewarisan oleh para tokoh-tokoh agama orang yang memahami ilmu hukum kewarisan Islam, maka akan tercipta Visi Misi yang diharapkan Kepala Desa Rampoang. Hukum kewarisan Islam memperlajarinya merupakan fardhu Kifayah.

¹⁷Ardaus. Kepala Desa Rampoang, *wawancara*, di Desa Rampoang pada Tanggal 08 Januari 2019

C. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum yang dalam pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan apabila ahli waris wafat, apabila hal tersebut terjadi maka ada waris yang menjadi masalah.¹⁸ apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaannya maka berarti ada harta warisan yang harus di bagi-bagikan kepada para ahli waris laki-laki ataupun perempuan yang masih hidup, juga memberikan bagian anak-anak yatim dan fakir miskin, di beberapa daerah di mana ajaran hukum Islam telah aplikasikan sistem kewarisan ini berlaku. Sistem ini menurut Hazairin merupakan sistem individual bilateral.

Hukum kewarisan Islam telah diatur dalam Al-Quran diantaranya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 7, 8, 9, 11, 12, 33 dan 176, ayat-ayat inilah membahas tentang hukum waris merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan jelas nash-nashnya dan secara terinci isi didalam kandungannya. Dalam ayat ini menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta kapan harta peninggalan (*tirkah*) boleh dibagi.



Terjemahnya:

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

¹⁸H.R.Otje salman dan Mustofa haffas, *Hukum waris Islam* ,(Cet.III; PT Refika Aditama , 2010), h. 4.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Tinjauan hukum kewarisan Islam Masyarakat Desa Rampoang terhadap praktik pembagian warisan hanya ada satu yang membagi hartanya menggunakan hukum Islam. Dalam pembagian warisan dalam Islam di Kenal dengan Asas Kematian harta di bagi apabila pewaris meninggal, namun praktik pembagian warisan masyarakat lokal pada Desa Rampoang membagi hartanya pada saat pewaris dalam keadaan hidup, hukum adat tidak mengenal asas kematian dan membagi hartanya pada saat ahli waris masih dalam keadaan hidup. Dalam pelaksanaannya pewaris membagi hartanya sudah sesuai dengan rukun, syarat dan sebab pembagian pewarisan. Namun pada dasarnya apabila pewaris tiba-tiba meninggal dunia maka yang harus di perhatikan keluarga adalah biaya tajdid (biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, wasiat, waris) apabila pewaris meninggal pada Bulan Suci Ramadhan maka keluarga berhak mengeluarkan zakat mal dan Zakat hartanya, hal ini merupakan kewajiban keluarga karena pewaris telah membagi hartanya terlebih dahulu. Sehingga hukum Islam dengan hukum adat ada menjadi sebuah perbandingan pada penerapan pembagian warisan masyarakat Lokal pada Desa Rampoang.

Pembagian warisan yang dilaksanakan oleh bapak Bahrn dalam keluarganya yang terdiri dari tiga anak, satu anak laki-laki, dan dua anak perempuan yakni dalam proses pembagiannya dengan musyawarah yang memimpin kepala rumah tanggan sendiri dan menghadirkan para saksi, para saksi yang datang keluarga yang dekat dengan beliau dan mendatangkan tokoh agama.

Pembagian harta diterapkan setelah harta yang dijumlah dan memisahkan rumahnya terlebih dahulu, yang dibagi adalah tanah. Bagian dari anak laki-laki lebih luas yang didapatkan karena pewaris menggap anak laki-laki membiayai isterinya kelak. Dan bagian dua anak perempuan tanah pula yang diberikan namun luas tanah yang didapatkan tidak sama dengan anak laki. Ketentuan ini telah melihat pembagian warisan Islam.

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan".ketentuan ini sesuai dengan hukum kewarisan Islam namun ada yang janggal pula didapatkan ternyata yang berhak mendapatkan rumah adalah seorang anak laki-laki. Apabila pewaris dan isteri meninggal pewaris telah membuatkan harta wasiatnya dan menagaskan yang berhak mendapatkan harta rumah adalah seorang anak laki-lakinya.

Sebelum harta warisan dibagi pewaris perlu memperhatikan rukun-rukun dalam waris mewarisi dalam pembagian warisan, rukun-rukun waris ialah *Mauruts (Tirkah)* atau harta peninggalan si pewaris, *Muwarris* yaitu orang yang meninggal, dan *Warist* orang mewarisi/ahli waris. Adapun syarat-syarat pusaka mempusakai adalah: *Matinya Muwarris* (orang yang mempusakan), hidupnya warist disaat kematian *Muwarris*, dan diketahui pertalian antara pewaris dengan *Muwarris*.

Bukan hanya rukun dan syarat-syarat yang perlu diperhatikan tetapi dalam pembagian harta warisan, syarat-syarat seorang mewarisi hartanya seseorang yang

meninggal dunia ada tiga macam yakni adalah hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan wala, dan hubungan seagama.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dinyatakan “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing’. Dalam kompilasi hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan atau waris, menentukan siapa-siapa saja berhak menjadi ashli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.¹⁹

Berdasarkan dengan hak-hak yang bersangkutan dengan harta benda peninggalan si mati, membagi harta ini menjadi lima dengan ketentuan:

- 1) Hak yang berhubungan dengan harta benda yang tinggalkan.
- 2) Hak yang berhubungan dengan pengurusan perawatan Mayit (*Tahfiz*).
- 3) Hak yang berhubungan dengan hutang-hutang si mati atau ahli waris.
- 4) Hak yang berhubungan dengan wasiat.
- 5) Hak yang berhubungan dengan keluarga yang ditinggalkan yang semestinya mendapatkan harta warisan.

Tujuan dari hukum waris Islam sendiri adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.²⁰

¹⁹H.R.Otje salman dan Mustofa haffas, *Hukum waris Islam* ,(Cet.III; PT Refika Aditama , 2010). h. 4.

²⁰ H.R.Otje salman dan Mustofa haffas, *Hukum waris Islam* h. 4.

Oleh karena itu, peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapat sendiri, secara usaha dengan perseorangan, atau pemberian secara sah dari orang lain maupun dari ahli waris dan harta warisan yang turun temurun, dalam hukum Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak menerima harta warisan.

Namun pada kenyataannya masyarakat lokal desa Rampoang dalam mendapatkan harta warisan dari ahli warisnya menggunakan hukum adat secara kekeluargaan yang bersifat Bilateral.

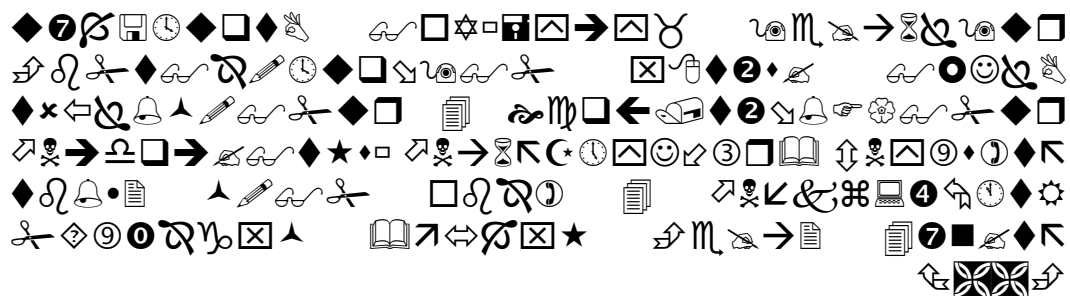
Hukum adat di Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan sehingga masyarakat lokal Desa Rampoang berpacu pada hal tersebut, oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, sistem kolektif dan sistem mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada hukum kewarisan itu berlaku,

Sebab sistem hukum kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral saja, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilinear seperti di tanah batak mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas, demikian juga sistem mayorat, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara.²¹

²¹Eman Suparman. *Hukum Warisan Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, Bw)*. (Cet; Ke Empat: Pt Refika Aditama, Bandung. Oktober 2014), h. 42.

Masyarakat lokal Desa Rampoang menggunakan sistem hukum kewarisan yang bersifat bilateral yang didapatkan oleh orang tua yang membagi hartanya kepada anak-anaknya, individual bilateral dan masyarakat Sulawesi terkenal dengan sistem bilateral, warisan di bagi secara adil dan tidak dikecualikan baik pria atau wanita.

Dasar atau dalil yang berlakunya sistem individual bilateral adalah terdapat pada QS. An-Nisa (4) ayat 7-8 mengenai bagian bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. Kemudian terdapat pula dalil naqli dalam QS An-Nisa (4) ayat 33:



Terjemahnya:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.²²

Namun demikian ketetapan Allah SWT mengenai pembagian harta warisan yang harus ditaati oleh umat Islam dengan disertai ancaman hukuman

²²Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*” (Cet.1; Solo:PT.ABYAN,2014), h. .79

sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa (4) ayat 13 dan 14 mengenai ketetapan dalam pembagian warisan.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pembagian Kewarisan Islam Pada Masyarakat Lokal Desa Rampoang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, dari dua belas Informan yang hanya melakukan praktik pembagian warisan secara islam hanya satu, selebihnya menggunakan hukum pembagian adat, karena masyarakat lokal Desa Rampoang kurang memahami tentang praktik pembagian kewarisan secara Islam. yang berhak mendapatkan rumah menurut pewaris adalah anak perempuan terakhir dan anak laki-laki terakhir. Pembagian harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris lainnya hanya mendapatkan tanah, apabila anak laki-laki lebih dari satu masing-masing mendapatkan sebidang tanah sedangkan anak perempuan mendapatkan tanah namun dibagi rata sesuai jumlah kapasitas harta warisan pewaris.

2. Tinjauan hukum kewarisan Islam masyarakat Desa Rampoang terhadap praktik pembagian warisan hanya ada satu yang membagi hartanya menggunakan hukum Islam. Dalam pembagian warisan dalam Islam di kenal dengan Asas Kematian harta di bagi apabila pewaris meninggal, namun praktik pembagian warisan masyarakat lokal pada Desa Rampoang membagi hartanya pada saat pewaris dalam keadaan hidup, hukum adat tidak mengenal asas kematian. Dalam

pelaksanaannya pewaris membagi hartanya sudah sesuai dengan rukun, syarat dan sebab pembagian pewarisan.

B. Implikasi/Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankalah peneliti untuk memberikan beberapa implikasi saran sebagai berikut:

1. Tata cara pembagian warisan adalah hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada umumnya dan masyarakat Desa Rampoang khususnya. Sistem dan praktik pembagian harta warisan yang berlaku pada masyarakat lokal Desa Rampoang adalah Hukum adat, namun dalam mengevaluasi masyarakat rampoang agar memahami praktik pembagaian warisan dengan sistem Hukum Islam. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada umat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau menggunakan sistem faraid.

2. Diharapkan perlunya dibentuk tim dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan kompenen lainnya hendaknya mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait tentang hukum kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi antara sistem dan praktik kewarisan dalam hukum Islam dan sistem kewarisan dalam hukum adat yang berada pada masyarakat Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara khususnya di masyarakat lokal Desa Rampoang.

DAFTAR PUSTAKA

A. *Al-Quran dan Hadist*

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*”(Cet.1; Solo:PT.ABYAN, 2014

Addarimi Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram, *Sunan Ad Darimi Kitab Mukaddimah*. Darul Fikri Bairut-Libanon. 1996 M.

Assubuhastaani Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy A's, *Sunan Abu Daud Kitab: Waris*. Darul Kutub I'lmiyah Bairut-Libanon. 1996 M

Assubuhastaani Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy A's. *Sunan Abu Daud Kitab: Ilmu*. Darul Kutub I'lmiyah Bairut-Libanon. 1996 M

Albukhari Alja'fi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari Kitab: Fara'idl*. Darul Fikri Bairut-Libanon. 1981 M

Annaishaburi Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi. *Shahih Muslim Kitab : Waris*. Darul Fikri Bairut-Libanon. 1993 M.

Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy A's Assubuhastaani. *Sunan Abu Daud Kitab: Pembebasan Budak*. Darul Kutub I'lmiyah Bairut-Libanon. 1996 M

B. *Buku*

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*,Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004.

Alsa Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Al-Sabouni Ali Muhammad, *Hukum kewarisan: menurut al-quran dan sunnah*. Cet I: Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Printer,PUBLISER & Distributors,2005.

Anselm, Strauss & Juliet, Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*. M. Shodiq & Muttaqien, Terj,Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007.

Perangin Effendi, *Hukum Waris* , Ed.I.Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1997.

Suparman Eman. *Hukum Warisa Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, BW)* Cet; Ke Empat: Pt Refika Aditama, Bandung. Oktober 2014

Poerwandari E. Kristi. *Pendekatan kualitatif dalam penelitian Psikologi*, Jakarta: LPSP3, 1998.

Idris H.M. Ramulyo. *Perbandingan Hukum kewarisan Islam dengan kewarisan kitab undang-undang hukuun perdata*, Ed.Revisi. Cet.1: Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ashary Abta dan Djunaidi Abd.Syukur, *ilmu waris Al Faraidl*. Cet I: Surabaya, JL. Batara jaya XXI 146.2005.

Koentjoro, *Berbagai jenis inquiry dalam penelitian kualitatif Unpublished manuscript*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2007.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Lubis ,K. Suhrawardi dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam, Lengkap Dan Praktis*, Ed. II; Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006),

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet: II Jakarta: Rajawali, 2011

Wery Gusmansyah, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*. Manhaj, Vol. 1, Nomor 2, Mei– Agustus, 2013.

Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2005, “*Inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*”.

Tim Penyusun, *Kamus besar bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.

C. *Wawancara dan Sumberdata*

Roswita. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara , di Desa Rampoang pada Tanggal 03 Januari 2019.

Nasbar. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 03 Januari 2019.

Umarsidi. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 03 Januari 2019.

Akbar. Iman Desa Rampoang, wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 04 Januari 2019.

Mujenni. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 04 Januari 2019.

Sumardin Dg. Mattiro. Tokoh Masyarakat. Wawancara , di Desa Rampoang pada Tanggal 05 Januari 2019.

Jasmil. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara di Desa Rampoang pada Tanggal 06 Januari 2019.

Supardin. Kepala Dusun Londoinga, wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 06 Januari 2019.

Bahran. Ketua Bundes, wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 06 Januari 2019.

Baso Yusril P. Dg Malinring. Tokoh adat Desa Rampoang, wawancara, di Desa Rampoang, pada Tanggal 06 Januari 2019.

Bahlis. Anggota Masyarakat Rampoang. Wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 08 Januari 2019.

Ardaus. Kepala Desa Rampoang, wawancara, di Desa Rampoang pada Tanggal 08 Januari 2019.